

**LAPORAN PANEL PENASEHAT INDEPENDEN TANGGUH
TENTANG
OPERASI
DAN
PENGEMBANGAN PROYEK TANGGUH**

DESEMBER 2017

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
II.	ISU-ISU YANG DISOROT	Error! Bookmark not defined.
III.	REKOMENDASI	13
IV.	BERITA TERKINI MENGENAI POLITIK DAN KEAMANAN	21
V.	PENGEMBANGAN TENAGA KERJA PAPUA.....	Error! Bookmark not defined.
VI.	PROGRAM PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KOMUNITAS.....	37

AKRONIM DAN ISTILAH-ISTILAH BAHASA INDONESIA

<i>adat</i>	Kebiasaan, hukum dan sistem penyelesaian perselisihan setempat yang diterapkan di banyak daerah di Indonesia
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
ADB	<i>Asian Development Bank</i> – Bank Pembangunan Asia
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBDF	<i>Bintuni Bay Development Foundation</i> – Yayasan Pembangunan Teluk Bintuni (YPTB)
BDS	<i>Business Development Service</i> – Jasa Pengembangan Bisnis
BIN	Badan Intelijen Nasional
BNPT	<i>National Counterterrorism Coordinating Agency</i> - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
BPMIGAS	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas mitra Pemerintah Indonesia dalam Proyek Tangguh (yang dinyatakan tidak konstitusional lagi dan dibubarkan pada tahun 2012)
BPK	Badan Pengawasan Keuangan
Brimob	Brigade Mobil
CAP	<i>Community Action Plan</i> – Rencana Aksi Masyarakat – pendekatan program dukungan untuk memfasilitasi proyek-proyek pembangunan yang didorong oleh masyarakat pada kampung-kampung yang terkena pengaruh secara langsung
CSTS	Konsorsium TEP dibawah kontrak EPC
DAV	Directly affected village - Desa yang terkena pengaruh secara langsung sebagaimana ditetapkan sejak awal oleh proyek LNG Tangguh
DG Migas	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

EITI	<i>Extractive Industries Transparency Initiative</i> - Prakarsa Transparansi Industri ekstraktif
ENR	<i>Energy and Natural Resources</i> – Energi dan Sumber Daya Alam
ESDM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
GOI	<i>Government of Indonesia</i> – Pemerintah Indonesia
Golkar	Golongan Karya – Partai politik besar di Indonesia
ICBS	<i>Integrated Community Based Security</i> - Pengamanan Terpadu Berbasis Masyarakat
ICITAP	Program Bantuan Pelatihan Investigasi Kejahatan Internasional Departemen Kehakiman Amerika Serikat
IEDP	<i>Indigenous Enterprise Development Program</i> - Program Pembangunan Kewirausahaan Pribumi
IPB	Institut Pertanian Bogor
ISP	Integrated Social Program – Program Sosial Terpadu – unit pelaksana di dalam Proyek Tangguh dan program-program pembangunan sosial-ekonomi yang dikelola oleh unit tersebut
JUKLAP	Pedoman Lapangan Bersama untuk Keamanan JUKLAP/PAMBERS 2009 pemutakhiran dan perpanjangan perjanjian JUKLAP
Kabupaten	Distrik atau kabupaten
Kapolda	Kepala Kepolisian Daerah Papua
Kapolres	Kepala Kepolisian Resor
Kapolsek	Kepala Kepolisian Sektor
Kodam	Komando Daerah Militer
Kodim	Komando Distrik Militer
KPPIP	Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
LARAP	<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan</i> – Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali – rencana aksi Proyek

	Tanggung yang menguraikan dampak tak sengaja dari pemukiman kembali Proyek
LNG	<i>Liquefied natural gas</i> – Gas alam cair
MOE&F	<i>Ministry of Environment and Forestry</i> – Kementerian Lingkungan dan Kehutanan
MOF	<i>Ministry of Finance</i> – Kementerian Keuangan
MOU	Memorandum of Understanding – Nota Kesepahaman
MRP	Majelis Rakyat Papua – suatu badan perwakilan yang terdiri dari para pemimpin agama, adat, dan perempuan yang dibentuk oleh Undang-undang Otonomi Khusus
Nasdem	Nasional Demokrat - Partai politik di Indonesia
NGO	<i>Non-governmental organization</i> - Organisasi Non-Pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat)
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development – Organisasi Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan
OPM	Organisasi Papua Merdeka – sebuah organisasi separatis
Otsus	Otonomi Khusus
Pangdam Papua	Panglima Komando Daerah Militer
PDI-P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan - Partai politik besar di Indonesia
Perdasus	Peraturan Daerah Provinsi Papua yang bersifat khusus – Perdasus disahkan oleh DPRD dan disetujui oleh MRP untuk mengalokasikan pendapatan usaha migas (DBH)
PLN	Perusahaan Listrik Negara – Perusahaan Tenaga Listrik di Indonesia
Polsek	Kepolisian Sektor
Proper	Audit dari kementerian lingkungan mengenai tingkat kepatuhan terhadap aspek lingkungan dan sosial
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
PKB	Partai Kebangkitan Bangsa – Partai Politik di Indonesia
PSC	Production Sharing Contract – Kontrak Bagi Hasil
PPP	Partai Persatuan Pembangunan - Partai Politik di Indonesia

RAV	Resettlement Affected Village - Desa Yang Terkena Pengaruh Pemukiman Kembali sebagaimana ditetapkan sejak awal oleh Proyek Tangguh -Tanah Merah Baru, Saengga, dan Onar
SBY	Susilo Bambang Yudhoyono
SKJ	Izin perjalanan yang diwajibkan yang membatasi akses ke Papua
SKKMIGAS	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, mitra Pemerintah Indonesia dalam Proyek Tangguh (yang menggantikan BPMIGAS)
SOP	<i>Standard operating procedure</i> – Prosedure Operasi Standar
TEP	Train 3 expansion project – Pembangunan Proyek Train 3
TCHU	<i>Tangguh community health Unit</i> – Unit Perawatan Kesehatan Tangguh
TIAP	<i>Tangguh Independent Advisory Panel</i> - Panel Penasihat Independen Tangguh
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TSDP	<i>Tangguh Sustainable Development Program</i> – Program Pembangunan Berkelanjutan Tangguh – Program sosial Tangguh yang akan menggantikan ISP sebelumnya di bawah AMDAL baru yang mengatur pengembangan Tangguh
UGM	Universitas Gadjah Mada
UNIPA	Universitas Negeri Papua di Manokwari
UNCEN	Universitas Negeri Cenderawasih di Jayapura
UP4B	Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat
VAT	Pajak Pertambahan Nilai
YSA	Yayasan Social Augustinus – sebuah yayasan daerah

I. PENDAHULUAN

Panel Penasihat Independen Tangguh (The Tangguh Independent Advisory Panel / TIAP atau Panel) memberikan nasihat secara independen kepada Pengambil Keputusan Senior BP mengenai aspek non-komersial dari Proyek LNG Tangguh (“Proyek”). Panel ini secara khusus memberikan nasihat kepada BP tentang bagaimana Tangguh dapat mencapai potensinya sebagai model kelas dunia untuk pembangunan.

Saat ini Panel diketuai oleh mantan Senator A.S Tom Daschle, yang pernah bertindak sebagai Pemimpin Mayoritas dari Senat A.S, dan Augustinus Rumansara, orang Papua yang memimpin Panel di ADB untuk mengkaji tingkat kepatuhan dari tahun 2003 hingga 2008, beliau juga menjabat sebagai penasihat untuk Pemerintah Papua sejak tahun 2008 sampai 2010 dan saat ini memimpin Satuan Tugas untuk Pembangunan Rendah Karbon di Papua.¹ Panel menggunakan seorang penasihat independen dan sekretariat yang dipimpin oleh Gary Klein dan tambahan dukungan dan nasihat dari Dewan Caroline Selby dari Grup Daschle.² Panel yang ada saat ini dibentuk tahun 2011 dan telah diperpanjang oleh BP hingga April 2020. Kesimpulan dan rekomendasi pada laporan ini merupakan informasi dari TIAP dan mencerminkan kondisi dan posisi pada saat kunjungan TIAP.

Ini adalah laporan keempat dari Panel dan laporan ini datang disaat waktu kritis. BP mulai melakukan perluasan pengembangan Tangguh yang akan menambah 50% dari kapasitasnya dan membawa ribuan pekerja baru ke lapangan tersebut. Program pengembangan yang dikenal Tangguh Expansion Project (Proyek Pengembangan Tangguh)³ akan mencakup train (fasilitas pencairan dan pemurnian gas) ketiga di lapangan LNG, sebuah dermaga tambahan, dua anjungan baru dan 16 sumur baru (selanjutnya disebut “Kilang 3”). Pada tahun 2014, BP menyelesaikan asesmen dampak sosial dan lingkungan (“TEP AMDAL”) yang akan mengatur komitmennya selama konstruksi pengembangan ini (pada awalnya dijadwalkan dari tahun 2017 – 2020) dan pengoperasiannya setelah itu.

Laporan ini akan menghadirkan pengalaman dan konsultasi TIAP kepada topik-topik ini dan untuk membantu mengarahkan BP dalam mengimplementasikan komitmen yang ada saat ini maupun yang baru, serta tantangan khusus yang terkait dengan operasi simultan dan kegiatan konstruksi yang besar. Seperti laporan TIAP sebelumnya, laporan ini akan

¹ Untuk tujuan laporan ini, istilah “Papua” merujuk ke daerah yang meliputi provinsi Papua dan Papua Barat. Istilah “Provinsi Papua” merujuk ke provinsi Papua menyusul pemisahannya dengan provinsi Papua Barat. Istilah “Papua Barat” merujuk ke provinsi Papua Barat (sebelumnya disebut Irian Jaya Barat) menyusul pendiriannya pada tahun 2004. Peta Papua dan Papua Barat yang menunjukkan lokasi kunci terkait dengan Tangguh dilampirkan sebagai Lampiran I.

² Panel sebelumnya, yang memantau fase konstruksi awal Proyek, diketuai oleh mantan Pemimpin Mayoritas Senat A.S, George Mitchell dan termasuk Lord Hannay dari Chiswick, Duta Besar Sabam Siagian dan Reverend Herman Saud.

³ Lihat laporan TIAP bulan Mei 2014 halaman 10 untuk keterangan lebih lengkap tentang usulan perluasan.

dipublikasikan bersamaan dengan tanggapan BP, dan akan dipresentasikan dan didiskusikan dengan pihak yang berkepentingan di Jakarta, London dan Washington, D.C.⁴

Selain kegiatan-kegiatan TIAP, Tangguh dipantau oleh Grup Pemberi Pinjaman Tangguh (Tangguh Lenders Group) yang diwakili oleh ADB, Japan Bank for International Cooperation dan Mizuho Corporate Bank, yang telah membentuk suatu panel eksternal yang dikelola oleh para ahli independen yang mengunjungi Tangguh. Tinjauan tahunan mereka dibatasi pada hal-hal menyangkut program keselamatan, lingkungan, program pemukiman kembali, dan sosial. Sebagai pengakuan terhadap pekerjaan Grup Pemberi Pinjaman Tangguh, TIAP berfokus pada hal-hal menyangkut keamanan, hak asasi manusia, tata kelola, manajemen pendapatan, situasi politik dan isu-isu yang lebih luas terkait dengan bagaimana Tangguh mempengaruhi masyarakat di Teluk Bintuni dan Papua dan bagaimana persepsi mereka terhadap hal itu. Faktor-faktor ini, lebih luas daripada aspek kepatuhan, secara terkait secara langsung dengan apakah BP dapat mencapai tujuannya untuk membuat Tangguh sebagai model untuk pembangunan berkelas dunia.

Pada bulan September 2017, TIAP mengunjungi Papua (Manokwari, Sorong dan Teluk Bintuni) serta Jakarta. Panel bertemu dengan LSM-LSM nasional, Kementerian, dan pejabat senior lain dari Pemerintah Indonesia ("GOI"), termasuk Menteri Koordinator Keamanan dan Politik, Menteri Badan Perencanaan Nasional, Kepala SKKMigas, Pejabat dari Badan Koordinasi Penanggulangan Terorisme ("BNPT"), Wakil Menteri Keuangan dan pejabat senior Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas ("KPPIP"). Panel juga berkesempatan untuk mendiskusikan Tangguh dengan Duta Besar Amerika Serikat dan Inggris. Selain itu, Panel juga bertemu dengan mitra pelaksana BP yang mendukung dan menilai program pengembangan sosial dan ekonomi BP.

TIAP bertemu dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Bupati Teluk Bintuni, Wakil Bupati dan stafnya, Panglima TNI Papua Barat (Pangdam), Kapolda Papua Barat, Kepala Polisi Teluk Bintuni ("Polres") dan Panglima TNI setempat. Di Teluk Bintuni, TIAP bertemu dengan penduduk desa Papua dari pantai utara dan pantai selatan. Sementara di Tangguh, TIAP bertemu dengan tenaga kerja dari Papua dan personel BP yang menjalankan manajemen, operasi, program pembangunan dan keamanan Papua di lokasi LNG. TIAP bertemu dengan pejabat senior dari kontraktor konsorsium EPC ("CSTS") yang mengelola konstruksi, keamanan dan keselamatan proyek ekspansi Tangguh, dan manajer BP yang mengkoordinasikan kegiatan ini dengan CSTS. TIAP juga bertemu dengan LSM Papua, advokat hak asasi manusia dan ilmuwan.⁵

Panel mengakui bahwa antara kunjungan dengan penerbitan laporan ini, terdapat perkembangan berkaitan dengan berbagai masalah utama yang ditinjau. Apabila memungkinkan, laporan ini akan membahas mengenai perubahan tersebut, namun jika

⁴ Laporan akan tersedia bersamaan dengan tanggapan BP, di situs BP. Lihat <http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9004751&contentId=7008791>

⁵ Lihat Lampiran II untuk daftar lengkap pemangku kepentingan yang dikonsultasikan oleh TIAP selama kunjungannya pada bulan September 2017.

dinyatakan lain, laporan ini didasarkan pada informasi yang tersedia di Panel per September 2017.

Panel meninjau program dan kegiatan BP sehubungan dengan norma-norma global terkini yang paling dihormati yang menciptakan praktik-praktik terbaik untuk proyek di negara berkembang. Hal ini mencakup Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia yang sudah lama dibentuk; Organisasi Untuk Pedoman Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (“OECD”) untuk Perusahaan Multinasional; Konvensi Organisasi Buruh Internasional Mengenai Masyarakat Pribumi dan Masyarakat Asli di Negara-negara Independen; Arahan Operasional Bank Dunia terkait dengan masyarakat pribumi dan Prinsip-prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia Amerika Serikat - Inggris (“Prinsip-prinsip Sukarela”). Panel juga berkonsultasi mengenai pedoman global terkini seperti Prinsip-prinsip Pedoman tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (“Prinsip Penuntun”); Standar Kinerja tentang Lingkungan dan Keberlangsungan Sosial IFC; dan Prinsip-prinsip Ekuator (berlaku secara langsung hanya untuk lembaga-lembaga keuangan).

Panel tidak mengaudit kepatuhan BP terhadap undang-undang setempat atau Indonesia, namun Panel meninjau kepatuhan BP terhadap kewajiban sosial dan lingkungannya berdasarkan AMDAL. Hal ini mencakup kewajiban atas AMDAL dari proyek Tangguh ekspansi. Panel diberi akses penuh ke semua informasi yang ia minta dari BP dan benar-benar independen dalam penyelidikan dan temuan-temuannya. Kesimpulan dan rekomendasi dalam laporan ini merupakan kesimpulan dan rekomendasi TIAP semata-mata, bukan BP. Panel mengharapkan BP untuk mengeluarkan tanggapan terhadap setiap rekomendasinya dan, sebagaimana dicatat di atas, mengantisipasi untuk mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membicarakan laporan ini dan tanggapan BP.

II. ISU-ISU YANG DISOROT

Dengan berlangsungnya pembangunan Proyek Ekspansi Tangguh, BP menghadapi beberapa isu-isu sulit yang telah ditemui TIAP. Banyak isu-isu yang berkepanjangan berkaitan tentang hubungan BP dengan masyarakat Papua, masih belum terselesaikan. Isu-isu tersebut termasuk tuntutan oleh masyarakat asli untuk kompensasi adat, kecemburuan antara penduduk wilayah utara dan selatan, penundaan penyediaan perumahan dan listrik di pantai utara, rekrutmen dan promosi pekerja Papua, kesulitan dalam penyusunan rencana pembagian pendapatan sumber daya alam yang telah disepakati, dampak migrasi masuk masyarakat non-Papua dan meningkatnya aktivitas kontraktor minyak dan gas lainnya di wilayah tersebut. Sementara beberapa kemajuan telah dicapai sejak laporan TIAP terakhir, resolusi yang memuaskan atas isu-isu tersebut tidak sepenuhnya dalam pengendalian BP. Namun, setelah pembangunan TEP dimulai, tingkat urgensi isu-isu tersebut semakin meningkat.

Ada beberapa daerah penting yang memiliki kinerja sangat baik – yaitu termasuk peluncuran proyek, keberhasilan lanjutan dari ICBS, kepatuhan terhadap standar

lingkungan, pemeliharaan dan penampilan fasilitas, hubungan tenaga kerja Papua, program kesehatan masyarakat dan hubungan komunitas secara umum. Namun, konstruksi TEP dan kewajiban AMDAL telah mempercepat jangka waktu untuk memberikan hasil pada program yang tertunda. Selain itu, operasi Tangguh dan konstruksi TEP secara bersamaan telah menghasilkan tantangan baru terkait keamanan dan keselamatan. Dalam memenuhi tantangan yang signifikan, penting dicatat bahwa tenaga kerja Tangguh, di setiap level, menampilkan profesionalisme tingkat tinggi dan sikap yang tulus terhadap tim.

A. Keamanan dan Keselamatan

BP menghadapi tantangan baru yang mungkin sama rumitnya dengan tantangan yang hadir sejak dimulainya proyek. Ancaman terhadap keselamatan dan keamanan yang dihadapi selama pembangunan Kilang 1 dan 2 meningkat secara material oleh operasi simultan dari fasilitas LNG yang ada; pekerja non-lokal dengan jumlah besar; dan realitas terorisme global, baik secara fisik maupun maya.

Pekerja sementara di lapangan, yang akan direkrut oleh CSTS dan subkontraktornya, berjumlah sekitar 10.000 orang atau lebih dalam tiga tahun ke depan selama masa konstruksi. Masing-masing pekerja bisa menjadi pegawai dari salah satu konsorsium CSTS, atau pegawai subkontraktor atau bahkan sub-subkontraktor. Ada kemungkinan bahwa beberapa entitas ini tidak memiliki fokus dan standar keamanan dan keselamatan seperti yang diminta BP terhadap karyawan dan operasinya sendiri.

Bencana terorisme global yang baru-baru ini terjadi menghadirkan tantangan jangka panjang yang signifikan, perlu segera ditangani dan dinilai ulang secara teratur. Tidak diragukan lagi bahwa fasilitas seperti Tangguh menghadapi ancaman terorisme, baik secara internal maupun eksternal, fisik dan maya. Tindakan ini sering dilakukan oleh individu atau kelompok radikal kecil. Menghadapi terorisme memang sulit, beberapa orang mengatakan tidak mungkin bisa memprediksi di mana atau kapan tindakan semacam itu akan terjadi. Ancaman ini harus dinilai dan dikurangi secara realistis. Aset keamanan terbesar Tangguh adalah lokasinya yang terpencil dan tidak dapat diakses, serta kepercayaan dan kepemilikan bersama yang telah dibangun terhadap komunitas setempat. Setiap upaya mitigasi yang dilakukan, jika mungkin, tidak boleh secara signifikan mengancam kepercayaan yang telah dibangun dan perasaan positif Tangguh dari desa-desa terdekat.

Perhatian yang besar perlu dilakukan untuk menjamin bahwa pekerja konstruksi TEP dari luar Papua tidak menghadirkan ancaman yang signifikan terhadap keamanan dan keselamatan proyek atau operasi yang ada. Meskipun banyak langkah-langkah yang berguna telah dilakukan, peningkatan lebih lanjut dan spesifik sangat dianjurkan. Meningkatkan kapasitas respon dan pelatihan keamanan internal BP dan keamanan kontraktor sangatlah penting. Penguatan dan pemantauan keamanan perimeter, serta menambah sumber informasi dari masyarakat lokal sangat penting. Selain itu, pengetahuan kewajiban terhadap persyaratan kontrak mengenai keselamatan dan keamanan pada CSTS dan subkontraktornya, yang disampaikan melalui koordinasi, pelatihan, pemantauan dan penerapan standar BP yang efektif, juga sangat penting. Jika kontrak atau rencana pelaksanaan yang ada tidak menyediakan sumber yang memadai atau memenuhi standar keselamatan dan keamanan, kontrak tersebut harus diubah.

B. Program Pembangunan Sosial dan Masyarakat

Meskipun isu-isu yang berkaitan dengan interaksi dan dampak BP dengan masyarakat bukanlah hal baru, konstruksi TEP dan pengeboran sumur baru menghadirkan persyaratan pengembangan masyarakat baru berdasarkan AMDAL TEP. Selanjutnya, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten yang baru, mungkin memiliki pandangan yang berbeda dari pendahulunya tentang implementasi program ini. Namun harapan di dalam masyarakat lokal adalah bahwa BP akan memenuhi program yang telah dijanjikan, termasuk perumahan di pantai utara, pendidikan dan listrik untuk seluruh masyarakat. Untuk tim hubungan masyarakat BP, ada cukup banyak pemahaman di antara penduduk desa bahwa BP tidak dapat menyampaikan program ini sendiri, dan bahwa pemerintah, di semua level, setidaknya memiliki beberapa tanggung jawab.

Seperti contoh isu penyediaan perumahan di pantai utara, yang telah didiskusikan bertahun-tahun,⁶ diwajibkan oleh AMDAL TEP dan siap untuk dimulai. Namun, penyediaan perumahan di pantai utara tertunda oleh diskusi yang berkepanjangan dan belum terselesaikan di pemerintahan provinsi dan kabupaten. Peraturan daerah yang telah lama dinegosiasikan untuk pembagian pendapatan sumber daya alam berdasarkan Otonomi Khusus (peraturan daerah khusus: Perdasus), yang akan memberikan pendanaan jangka pendek dan panjang untuk masyarakat adat setempat, juga telah terhenti. Serta penyediaan listrik berbasis tiang listrik yang dapat diandalkan untuk Babo dan desa setempat, dengan kekuatan yang dibuat oleh unit generasi 8MW yang dibangun dan beroperasi di Tangguh, juga telah tertunda oleh PLN.

Yang terpenting, pemerintah telah menerima tanggungjawab atas tuntutan kompensasi adat yang telah lama diminta, yang beberapa di antaranya berusaha menerapkan tanggung jawab tersebut pada BP, untuk pengeboran sumur di atas tanah adat. Namun ketidaksetujuan pemerintah Indonesia telah menghambat implementasi. Beberapa pihak menginginkan BP untuk berpartisipasi dalam pembayaran ini, walaupun pembayaran klaim adat selalu dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah, bukan operator. BP harus menolak permintaan apapun yang memainkan peran dalam skema pemberian uang tunai kepada pemimpin adat, bahkan jika diminta oleh pemerintah.

BP tidak mengendalikan tindakan pemerintah dalam hal ini. Namun, resolusi dari isu-isu ini sangat berpengaruh secara langsung terhadap operasi dan keamanan Tangguh, dan juga bisa mempengaruhi waktu penyelesaian TEP. Kepercayaan dan dukungan keras dari masyarakat setempat merupakan salah satu aset terbesar Tangguh. Namun karena berlanjutnya penundaan dalam program yang dijanjikan ini, kesabaran dari beberapa anggota masyarakat setempat semakin menipis. Perkembangan nyata dalam satu isu utama atau lebih, karena konstruksi TEP berlanjut, akan menunjukkan realitas janji AMDAL secara nyata.

⁶ Lihat laporan TIAP pada bulan Desember 2015.

C. Advokasi dan Koordinasi Pemerintah

Upaya-upaya dari tim hubungan masyarakat dan pemerintah BP telah menjadikan hubungan yang baik dengan pejabat di berbagai level pemerintahan, terutama di tingkat desa, kabupaten dan provinsi. Sebagian besar pemimpin daerah mendukung Tangguh dan senang dengan sikap dan program BP. Hal ini sangat penting mengingat pergantian yang begitu banyak dari pejabat-pejabat tersebut sejak kunjungan terakhir TIAP.

Namun meskipun memiliki hubungan baik, banyak dari pemegang jabatan ini berfokus pada isu-isu yang berbeda dan tidak sepenuhnya memiliki peran seperti pelaksanaan program sebelumnya. Selain itu, pejabat tersebut beserta administratornya baru mengenal sistem pemerintahan dan persyaratan perencanaan untuk melaksanakan program ini. Kebutuhan untuk mengoperasikan Tangguh secara efisien dan menyelesaikan TEP sesuai jadwal diasumsikan sebagai pekerjaan BP, dan seringkali bukan termasuk prioritas mereka.

Pemerintah Indonesia telah mendeklarasikan TEP sebagai salah satu dari empat proyek infrastruktur strategis nasional yang, hal ini memberikan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan.⁷

Instansi pemerintah yang paling berminat dalam menyelesaikan proyek vital ini adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan dan SKKMigas. Presiden juga telah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas ("KPPIP"), sebuah badan koordinasi khusus yang dirancang untuk memperlancar jalannya program hingga penyelesaian dapat tepat waktu. Semua lembaga nasional ini memiliki tanggung jawab untuk kepentingan publik yang lebih besar dan keberhasilan penyelesaian TEP. BP memiliki hubungan baik dengan masing-masing lembaga ini, yang setiap pihak memahami isu dan tantangan sosial utama yang dihadapi proyek ini. Akan tetapi, sejauh ini upaya mereka dalam memecahkan kemacetan proses di pemerintah lokal dan daerah, serta PLN, masih belum efektif.

Sehubungan dengan itu, ada waktu jeda yang cukup lama dalam dukungan BP untuk pemerintahan daerah.⁸ Karena pemilihan umum baru terjadi di Papua, banyak pejabat baru di pemerintah kabupaten dan provinsi yang memiliki pengalaman terbatas dan tidak pernah menerima pelatihan dari para ahli dalam pemerintahan. BP berencana untuk memulai kembali hubungan kemitraannya dengan UGM untuk memberikan dukungan ke kabupaten pada awal tahun 2018. Bupati menyambut dan membutuhkan dukungan ini. Program ini tidak boleh ditunda dan harus diperluas. Bantuan serupa harus didiskusikan dengan Gubernur, untuk membantu pemerintah provinsi dan DPRD dalam melaksanakan program yang berkaitan dengan komitmen Tangguh.⁹

⁷ Lihat, misalnya, "Four oil, gas projects added to government priority list" petromindo.com, 24 Juni 2017.

⁸BP telah mendukung upaya untuk memperbaiki tata pemerintahan daerah hampir sejak dibentuknya kabupaten pada tahun 2004. Namun, karena isu yang tidak terkait, dukungan ini dengan mitra BP yaitu UGM dihentikan dua tahun lalu dan belum diperbarui. Lihat Laporan TIAP Mei 2014 halaman 47; dan Laporan Desember 2015 halaman 45.

⁹ Baru-baru ini dilaporkan bahwa provinsi Papua Barat hanya menghabiskan 30% dana yang dialokasikan selama tiga kuartal pertama tahun 2017. Tuntutan tender pengadaan barang dan jasa, yang menggunakan

Selain itu, upaya hubungan pemerintah yang lebih aktif di level yang lebih tinggi yaitu Pemerintah Indonesia harus dilakukan. Garis komunikasi harus ditingkatkan antara manajemen senior BP Indonesia dan kantor Presiden dan Wakil Presiden serta Menteri Koordinator dengan yurisdiksi atas Tangguh. Para pejabat tinggi tersebut harus selalu diinformasikan tentang pentingnya menyelesaikan penundaan dan perselisihan lokal, dan meminta untuk melakukan intervensi jika memungkinkan.

Yang terpenting adalah upaya untuk menjadwalkan ulang kunjungan Presiden ke Tangguh. Sebelum mendapat komitmen dari Presiden untuk mengunjungi lokasi LNG, BP harus mencari isu-isu utama yang berkaitan dengan Tangguh agar masuk ke dalam agenda kunjungan Presiden ke Papua Barat mendatang. Selanjutnya, BP harus mendorong dan memfasilitasi pertemuan rutin pejabat penting Pemerintah Indonesia dengan Gubernur dan Bupati untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi TEP.

Hal yang juga penting yaitu manajemen senior BP Group ikut berpartisipasi dalam upaya ini. Untuk mendorong Presiden Jokowi berkunjung ke Tangguh, bersamaan dengan pemimpin lokal, CEO Grup, pada kunjungan berikutnya ke Indonesia, harus menyampaikan undangan kepada Presiden untuk bergabung dalam kunjungannya ke Tangguh. Jika Presiden dapat mengumumkan awal mula atau tonggak sejarah program sosial Tangguh, akan lebih baik mengenai perumahan di pantai utara atau listrik, hal tersebut akan memberikan insentif lebih lanjut bagi Presiden untuk mengunjungi Teluk Bintuni dan Tangguh. Untuk membantu memberikan insentif semacam itu, BP harus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan salah satu dari masalah-masalah utama. Dengan demikian, kunjungan Presiden tidak hanya mendidik beliau mengenai pentingnya Tangguh dan TEP terhadap Indonesia dan Papua, namun juga memungkinkan Presiden untuk menyoroti hubungan antara Tangguh dan program sosial besar untuk orang Papua. Idealnya, Presiden, bersama Gubernur dan Bupati, dapat meresmikan program perumahan di pantai utara, yang dirancang sepenuhnya untuk masyarakat adat, sekaligus juga merayakan tonggak sejarah TEP.

D. Pengembangan Tenaga Kerja Papua

Kewajiban AMDAL BP dalam pengembangan tenaga kerja Papua selalu termasuk yang paling penting bagi masyarakat luas dan pemimpin yang terpilih. Mereka juga yang paling mudah dikuantifikasi. Dalam memenuhi persyaratan AMDAL untuk tenaga kerja terampil Papua pada tahun 2029 masih merupakan tantangan serius bagi BP. Selama lebih dari satu dekade, BP mencoba berbagai program untuk merekrut orang Papua dan mengembangkan keterampilan mereka, namun sejauh ini tidak ada pencapaian hasil yang diharapkan dan diperlukan. Tingkat tenaga kerja Papua secara keseluruhan telah terhenti selama beberapa

sistem e-procurement (LPSE) untuk pertama kalinya, dinyatakan sebagai penyebab utama rendahnya tingkat penyerapan. Lihat "Papua Barat Legislator: Local Budget Absorption Only 30%, Disadvantaging Local People," Cahayapapua.com, 16 September 2017.

tahun yaitu sekitar 54%; Yang lebih signifikan, penduduk asli Papua yang mengisi posisi keterampilan tinggi dan pengawas sangat sedikit.¹⁰

Namun, sejak kunjungan terakhir TIAP, BP telah memberikan perhatian dengan menunjuk manajemen senior tambahan terkait permasalahan ini. Hasil langsung memiliki potensi untuk memberikan dampak keuntungan jangka panjang. Pertama, BP telah memprakarsai program magang yang mengesankan, yaitu melatih lulusan SMA terpilih dari Papua Barat dalam keterampilan teknis, termasuk dibidang kelistrikan, mekanik dan operasi. Yang terpenting adalah program tiga tahun pertama fokus pada pelatihan bahasa Inggris. BP menerima 40 siswa terbaik per tahun dalam program magang dengan upaya untuk menghasilkan 180 karyawan terampil. Tidak realistis untuk berpikir bahwa semua siswa ini akan lulus, atau setiap lulusan akan berkarier di Tangguh. Dengan demikian, tingkat penerimaan harus disesuaikan dengan memperhitungkan pengurangan tersebut.

Kedua, BP telah membentuk Panitia Pengarah untuk Tenaga Kerja Papua untuk memberi informasi lebih baik kepada karyawan Papua dan, yang lebih penting, mendengarkan berbagai aspirasi dan gagasan dari tenaga kerja Papua.¹¹ Manajemen senior telah melakukan pertemuan dengan kelompok tersebut pada sebagian besar kunjungan ke Tangguh. Meskipun ada beberapa kekhawatiran terkait perekrutan orang Papua dan promosi, karyawan Papua, dan mungkin juga orang lain yang mereka wakili, merasa senang dengan peningkatan dukungan yang mereka dapatkan dari manajemen senior dalam dua tahun terakhir. Pelatihan bahasa Inggris di lapangan tampaknya jauh lebih mudah diakses dan dimanfaatkan. Selain itu, program mentoring sudah jauh lebih baik.

TEP merupakan bagian penting dari pengembangan tenaga kerja Papua sejalan dengan persyaratan AMDAL. BP telah mengambil langkah-langkah yang mewajibkan kontraktor CSTS untuk memenuhi target perekrutan tenaga Papua. CSTS dan subkontraktornya harus mempekerjakan orang asli Papua untuk semua pekerjaan tidak terampil, 93% semi terampil, dan 12% posisi terampil.¹² Komitmen ini harus dipantau secara ketat oleh BP mengingat kepentingan mereka dan potensi kegagalan dapat meningkatkan ketegangan lokal. Sejauh ini, selain masalah rekrutmen di kota Bintuni yang merupakan hasil dari masalah politik lokal, kontraktor tampaknya memenuhi targetnya. Ini adalah awal dari proses perekrutan TEP; BP harus waspada dalam kelalaiannya, berikan dukungan jika diperlukan, dan memanfaatkan kontrak untuk melihat bahwa persyaratan tersebut terpenuhi sepanjang konstruksi.

E. Lingkungan dan Pemeliharaan

Lingkungan dan pemeliharaan secara umum adalah area lain di mana BP tidak lagi memegang kendali penuh atas semua aktivitas dan hasilnya. Kinerja lingkungan BP dalam beberapa tahun terakhir mendapatkan peringkat pertama. Audit tahunan Kementerian Lingkungan Hidup untuk operasi Tangguh ("PROPER") telah memberikan peringkat

¹⁰ Lihat Appendix III.

¹¹ Ini merupakan salah satu rekomendasi prioritas TIAP dalam laporan tahun 2015, lihat laporan TIAP pada bulan Desember 2015 halaman 14.

¹² Lihat Appendix III.

tahunan tertinggi pada tingkat “Biru” selama empat tahun berturut-turut, hal tersebut menunjukkan kepatuhan penuh terhadap AMDAL dan peraturan lingkungan. Akhirnya, ini dapat memberikan hak kepada Tangguh untuk mendapatkan status hijau. Panel Pemberi Pinjaman, yang melakukan tinjauan lingkungan secara rinci, menemukan hanya dua masalah ketidakpatuhan pada level 1.¹³ Pembakaran gas di tahun 2015 adalah volume terendah sejak operasi dimulai.¹⁴

Terlihat jelas bahwa semua kegiatan TEP harus sepenuhnya sesuai, agar hasil yang baik dapat terus berlanjut. Meskipun BP memiliki otoritas pengawasan tertentu atas kontraktornya, CSTS dan subkontraktornya akan melakukan aktivitas sehari-hari dan harus tetap sesuai dengan azas kepatuhan. Hal ini termasuk kinerja pengelolaan sistem limbah padat, limbah berbahaya, air dan air limbah yang dirancang untuk tenaga kerja dalam konstruksi besar.¹⁵ Ada masalah ketidakpatuhan mengenai pembuangan limbah padat selama konstruksi di sebagian Kilang 1 dan 2 yang disebabkan oleh ukuran angkatan kerja yang tidak terduga. Oleh karena itu, seiring bertambahnya tenaga kerja, BP memiliki kewajiban untuk memastikan pengawasan dan koordinasi secara ketat dan teratur terhadap kontraktor mengenai kepatuhan lingkungan. Pengawasan harus mencakup pertemuan mingguan untuk menangani semua kegiatan yang sedang berlangsung dan yang direncanakan serta mekanisme untuk respon cepat terhadap masalah-masalah yang dapat timbul secara tidak terduga.

Terkait penampilan fisik dan pemeliharaan umum atas fasilitas operasi di Tangguh, dengan sedikit pengecualian, penampilan fisik dan pemeliharaan umum telah meningkat dalam dua tahun terakhir. Keuntungan ini mungkin akan lebih sulit dipertahankan di tengah proyek konstruksi besar. Meskipun demikian, BP tidak boleh mentolerir fasilitas yang menjadi tanggung jawabnya, atau lokasi konstruksi TEP pada umumnya, untuk mencerminkan pemeliharaan yang berkurang atau buruk selama konstruksi. BP harus terus menyadari pentingnya penampilan fisik sebagai pengingat harian tentang kebanggaan dan standar yang dapat diinginkan setiap karyawan dalam tanggung jawabnya masing-masing.

III. REKOMENDASI

A. Tata Kelola dan Advokasi

1. Melanjutkan dukungan tata kelola bagi pemerintah daerah; dukungan tersebut tidak boleh ditunda dan harus ditingkatkan. Dukungan

¹³ Panel Pemberi Pinjaman, yang melakukan tinjauan lingkungan secara rinci, pada bulan Juli 2017 menemukan masalah ketidakpatuhan level 1 mengenai rencana penilaian dan pengelolaan dan pembukaan lahan dan drainase.

¹⁴ Volume suar pada tahun 2015 adalah 1808 mmscf dibandingkan 1992 mmscf pada tahun 2014. Volume suar pada tahun 2016 lebih tinggi yaitu sebesar 2.226 mmscf akibat penutupan dan perputaran yang direncanakan.

¹⁵ Lihat Laporan TIAP Maret tahun 2009 halaman 42-43.

harus dibahas dengan Gubernur demi membantu gubernur dan DPRD melaksanakan program-program yang terkait dengan komitmen Tangguh.

2. Lebih aktif berupaya dalam menjalin dengan Pemerintah Indonesia pada level yang lebih tinggi harus segera dilakukan. Meningkatkan garis komunikasi antara manajemen senior BP Indonesia dengan Presiden dan Wakil Presiden serta Menteri Koordinator Bidang dengan adanya wewenang Tangguh. Para pejabat tinggi tersebut harus selalu diinformasikan tentang pentingnya menyelesaikan penundaan dan perselisihan pada tingkat lokal, dan meminta untuk melakukan intervensi jika memungkinkan.

3. Upaya-upaya untuk menjadwalkan kembali kunjungan Presiden ke Tangguh harus segera diperbarui. Sebelum kunjungan Presiden, BP harus mencari isu-isu utama yang berkaitan dengan Tangguh masuk ke dalam agenda kunjungan Presiden ke Papua Barat. Selanjutnya, BP harus mendorong dan memfasilitasi pertemuan rutin pejabat penting Pemerintah Indonesia dengan Gubernur dan Bupati untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi TEP.

4. *Group CEO*, pada kunjungan berikutnya ke Indonesia, harus menyampaikan undangan kepada Presiden untuk bergabung dalam kunjungannya ke Tangguh. Untuk memberikan insentif lebih lanjut kepada Presiden dalam mengunjungi Teluk Bintuni dan Tangguh. BP harus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan pemimpin daerah dalam mengatasi masalah, sehingga Presiden dapat mengumumkan tonggak bersejarah program sosial Tangguh, seperti program listrik atau perumahan di pantai utara. Hal ini akan mengizinkan Presiden menyoroti hubungan antara Tangguh dan program sosial yang besar untuk masyarakat asli Papua.

B. Pengembangan Tenaga Kerja Papua

1. Upaya yang berkelanjutan harus segera dilakukan untuk merekrut, melatih dan mempromosikan masyarakat Papua agar komitmen AMDAL untuk target tenaga kerja Papua tahun 2029 dapat dipenuhi.

2. Program magang untuk orang Papua menunjukkan janji besar BP untuk melatih tenaga ahli. BP harus tetap berkomitmen terhadap program ini selama posisi untuk lulusan program magang tetap ada. Berdasarkan tingkat pengurangan yang tidak dapat dihindari, BP juga harus mempertimbangkan masalah peningkatan ukuran penerimaan program magang.

3. BP juga harus meningkatkan rekrutmen masyarakat Papua yang memenuhi kualifikasi dan berpengalaman untuk dapat mengisi posisi yang lebih tinggi. Paling tidak, BP harus meningkatkan pengumuman kepada publik mengenai lowongan pekerjaan BP di berbagai universitas Papua dan lapangan pasar kerja lainnya di Papua melalui iklan atau rekrutmen di lokasi.

BP harus memberi tahu semua kesempatan kerja kepada karyawan Papua, mendaftarkan mereka sebagai perekrut dan meningkatkan jaringan calon pelamar. Selanjutnya, BP harus menyewa konsultan ketenagakerjaan, yang berpengalaman di bidang ini, untuk mencari masyarakat Papua yang berbakat dan berkualitas.

4. Manajemen senior BP harus terus melakukan pertemuan dan bertukar pandangan secara teratur dengan Komite Pengarah Tenaga Kerja Papua. Grup ini menyediakan sebuah mekanisme komunikasi yang berguna dan terorganisir untuk karyawan Papua dalam mengutarakan masalah-masalah dan aspirasi atau menyarankan ide-ide mengenai pengembangan karir dan peluang kerja masyarakat Papua.

5. Manajemen senior BP juga harus terus mendorong semua manajer di Tangguh untuk membimbing karyawan Papua yang meminta kepada mereka.

6. Karyawan Papua yang berkualitas harus diberi tahu tentang pembukaan lowongan pekerjaan yang ada di Jakarta, dan diberi kesempatan yang sama untuk mengisi posisi tersebut.

7. Untuk setiap jasa atau produk yang dikontrakkan untuk Tangguh, BP harus memasukkan kebijakan ke dalam kontrak yaitu hak BP untuk mengenakan sanksi keuangan kepada kontraktor jika mereka tidak memenuhi persyaratan perekrutan tenaga kerja Papua yang telah disepakati sebelumnya, dan mereka harus mematuhi persyaratan tersebut.

8. Bagi TEP, BP telah memberlakukan kewajiban dalam kontrak bagi CSTS dalam memenuhi target perekrutan tenaga kerja Papua. Persyaratan ini harus dipantau oleh BP dan diberlakukan secara ketat, mengingat pentingnya dan jangka waktu yang singkat. Jika perekrutan atau pelatihan tambahan diperlukan, BP harus bersikeras bahwa langkah tersebut harus segera dilembagakan, karena memenuhi persyaratan dan patuh terhadap hal tersebut akan jauh lebih baik daripada denda.

C. Lingkungan dan Pemeliharaan

1. Kinerja lingkungan BP untuk operasi Tangguh sangatlah baik. Untuk memastikan kepatuhan terhadap aspek lingkungan pada kegiatan TEP, BP harus menjaga pengawasan dan terus waspada serta melakukan koordinasi dengan kontraktor. HAL Ini harus mencakup pertemuan mingguan untuk menangani semua kegiatan yang sedang berlangsung dan yang direncanakan dengan dampak lingkungan yang potensial serta mekanisme untuk memberikan tanggapan cepat terhadap masalah yang akan timbul secara tak terduga.

2. BP harus terus meyakini bahwa pentingnya menjaga penampilan fasilitas sebagai pengingat harian terhadap kebanggaan dan standar bagi setiap karyawan. Seharusnya tidak mentolerir fasilitas yang terlihat pemeliharaannya kurang atau buruk, dimana BP memiliki tanggung jawab atas fasilitas tersebut, atau pada lokasi konstruksi TEP pada umumnya.

D. Keamanan

1. Mengingat potensi dari konsekuensi serangan dunia maya dan evolusi peretasan secara global (*global hacking*) yang terus berlanjut, BP harus terus menerapkan dan melaksanakan prosedur yang ketat dan canggih, dan BP harus memeriksanya secara teratur. Semua karyawan yang memiliki akses ke sistem operasi Tangguh harus diberikan pelatihan on line mengenai keamanan secara reguler.

2. Sistem operasi dan produksi Tangguh harus benar-benar terputus dari internet, dan akses harus dibatasi pada personil Tangguh yang berwenang dan memiliki banyak lapisan keamanan. TIAP juga sangat mendukung audit dua tahunan BP Group mengenai *cybersecurity*.

3. Sangat penting bahwa Rencana Pengelolaan Keamanan CSTS dilaksanakan secara sepenuhnya dan benar, terutama karena ini diberlakukan di antara semua subkontraktor. BP harus menggunakan proses koordinasi dan verifikasi dari rencana keamanan untuk mengawasi semua elemen keamanan TEP dan menuntut agar setiap aspek rencana keamanan dapat berjalan efektif. Sebagai tambahan, ketika mobilisasi para pekerja meningkat, BP harus bersikeras bahwa setiap kekurangan yang dirasakan dapat dikoreksi.

4. Pelatihan lanjutan untuk para petugas keamanan terkait asesmen dan pemetaan perilaku serta deteksi dan penanganan masalah, harus dibuat permanen. Para petugas keamanan yang terlatih dalam keterampilan ini harus ditugaskan secara teratur untuk bertugas di kampung-kampung terdekat. Pelatihan ini harus diberikan kepada petugas keamanan selama jam kerja mereka, dan dipandang sebagai bagian dari tugas mereka yang dibutuhkan, secara reguler dan penting. Petugas keamanan tambahan harus dipekerjakan jika diperlukan untuk mengakomodasi persyaratan pelatihan ini.

5. BP harus meninjau ulang pelatihan yang diberikan sejauh ini untuk para petugas keamanan TEP, dan menentukan apakah pelatihan tersebut memberikan tingkat pelatihan dan kompetensi yang dibutuhkan di bawah ICBS dan JUKLAP. Jika tidak, modifikasi pelatihan harus dilakukan.

6. BP harus yakin bahwa upaya CSTS cukup memadai dalam mendeteksi kemungkinan ancaman keamanan dari karyawan CSTS dan semua subkontraktornya. BP harus meninjau semua proses pemeriksaan

untuk meminimalkan kemungkinan individu yang memiliki potensi ancaman dipekerjakan. Kode Etik BP harus diberlakukan secara ketat dan BP harus segera diberitahu tentang adanya pelanggaran atau perilaku lain oleh karyawan yang dapat menimbulkan ancaman. Karyawan harus diberi tahu bahwa kamar dan barang pribadi mereka akan dikenakan inspeksi mendadak oleh petugas keamanan untuk mencegah penyelundupan atau bahan-bahan yang bersifat radikal. Setiap hukuman yang dikenakan untuk pelanggaran perilaku harus dilakukan secara bersamaan oleh CSTS dan BP.

7. Meningkatkan sesi pertemuan untuk pengumpulan informasi, sangat penting untuk mendeteksi dan peringatan dini terhadap aktivitas yang mencurigakan. Keamanan Tangguh harus terus mendorong masyarakat setempat untuk berbagi informasi dengan BP tentang pendatang baru dan kegiatan yang tidak biasa atau tertutup, termasuk kesadaran akan kegiatan di rumah ibadah, untuk mendeteksi perilaku mengancam atau menghasut yang berkaitan dengan Tangguh.

8. Perimeter keamanan harus ditingkatkan. Langkah yang lebih efektif dapat dimanfaatkan agar lebih aman dan memantau garis perbatasan. BP harus mempertimbangkan pagar yang lebih baik, serta meningkatkan penggunaan CCTV, *drone* dan patroli dilakukan setiap hari.

9. Keamanan laut harus ditingkatkan lebih lanjut. Selama konstruksi, keamanan CSTS memiliki tanggung jawab utama dalam melindungi dan menjamin keselamatan semua wilayah konstruksi di pesisir dan kelautan. Namun karena akan ada begitu banyak lalu lintas di sekitar lokasi LNG selama konstruksi, penting bagi BP untuk dapat mengidentifikasi semua kapal di dekat dermaga atau berbagai platform lain sebelum mereka tiba. Berkoordinasi dengan CSTS, memanfaatkan radio atau komunikasi lainnya, serta CCTV, radar, lidar, atau teknologi lain yang tersedia, BP harus memfasilitasi peringatan dini tentang aktivitas laut yang memiliki intensitas buruk. Selain itu, komunikasi reguler dengan pangkalan Angkatan Laut di Sorong harus dilembagakan, melalui jalur yang tepat, terutama untuk mengkoordinasikan tanggap darurat. Selanjutnya, BP harus menjajaki kemungkinan potensi peningkatan kapasitas unit patroli bersama (*joint mobile patrol*/"JMP") dengan polisi untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan di sekitar kawasan penangkapan ikan tradisional.

10. Prosedur respon cepat di lokasi untuk skenario ancaman keamanan tingkat tinggi harus dapat dibedakan secara jelas dari prosedur yang digunakan untuk kebakaran, ledakan atau keadaan darurat keselamatan lainnya. Tindakan yang direkomendasikan untuk personil harus mencerminkan pose ancaman yang berbeda.

11. Tindakan mitigasi terhadap kendaraan (Hostile Vehicle Mitigation "HVM") harus ditingkatkan. Mengamankan penyimpanan kendaraan, kunci, atau perangkat pengapian lainnya, sangatlah penting. BP

juga harus mempertimbangkan kemungkinan dan kepraktisan memasang alat pengatur atau perangkat lain, kecuali kendaraan darurat, yang dapat membatasi kecepatan tertinggi mereka dengan kecepatan rendah yang dibutuhkan oleh kendaraan di lokasi.

12. Pelatihan tahunan bersama dengan polisi dan TNI yang dipersyaratkan dalam JUKLAP harus diadakan setiap tahun, dan harus memvalidasi kemampuan BP untuk mengurangi ancaman keamanan tingkat tinggi. Latihan tersebut harus melatih tanggapan yang terkoordinasi, melibatkan keamanan Tangguh dan CSTS, serta polisi dan TNI. Kegiatan ini harus dijadikan tambahan dalam latihan tahunan dalam rencana keamanan CSTS, yang bukan untuk pengamanan untuk publik.

13. BP harus mendukung konferensi reguler yang dipimpin oleh SKKMigas untuk kontraktor minyak dan gas dan para profesional sekuriti untuk membandingkan berbagai ancaman dan prosedur penanganan keamanan serta untuk berbagi pengalaman mengenai praktik terbaik.

14. Kapasitas keamanan dari Tangguh harus ditingkatkan dengan senjata yang lebih efektif untuk menggagalkan serangan jika tidak mengatasi serangan bersenjata. Senjata tidak mematikan, seperti senapan gel, semprotan merica, peluru karet, senjata api dan mungkin perangkat lain harus tersedia di tingkat elite penjaga senior yang telah menunjukkan kapasitas mereka dan telah dilatih dengan seksama dalam penggunaannya. BP harus bekerja sama dengan kontraktor keamanan untuk membentuk kader penjaga keamanan elit, yang bisa menjadi promosi bagi para penjaga dengan kinerja terbaik. Jika kontrak yang ada tidak mengizinkan peningkatan kapasitas atau struktur pasukan keamanan ini, maka kontrak tersebut harus didiskusikan dengan kontraktor keamanan sebagai amandemen terhadap kontrak yang ada.

E. Perumahan Pantai Utara

1. BP harus secara aktif terlibat dengan pejabat daerah dan nasional dalam upaya untuk membantu menyelesaikan perselisihan ini. BP harus melibatkan pejabat senior Pemerintah Indonesia, termasuk jika memungkinkan Kantor Presiden, meminta bantuan mereka untuk menengahi dan menegosiasikan solusi yang cepat. BP dapat mengusulkan alternatif, seperti menerapkan program secara bertahap, yang memungkinkan diskusi mengenai cakupan program yang tepat saat konstruksi berlangsung.

2. Sejak Gubernur dan Bupati yang baru ingin menggunakan platform adat untuk resolusi konflik yang disebut Gelar Tikar Adat (GTA) untuk menyelesaikan masalah terkait pembangunan perumahan pantai utara, BP harus belajar lebih banyak mengenai proses GTA, dan menilai apakah GTA juga bisa digunakan sebagai platform resolusi konflik berbasis komunitas di tingkat kampung di masa mendatang.

3. Jika penundaan berlanjut sampai 2018, BP harus meminta otoritas dari SKK Migas untuk mendanai pembangunan beberapa perbaikan infrastruktur yang dipilih oleh masing-masing kampung, seperti jembatan baru, bangunan umum atau jalan setapak, sebagai bagian niat baik yang ditunjukkan BP dan sebagai bentuk kompensasi atas penundaan kegiatan.

4. Setiap pelaksanaan program dimulai, BP harus berusaha keras untuk mempercepat waktu penyelesaian setidaknya fase yang direncanakan pada tahun 2020, bertepatan dengan pembukaan Kilang ketiga.

F. Listrik

1. BP harus bekerja sama dengan para pemimpin di tingkat nasional, termasuk SKKMigas, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas ("KPPIP") dan yang lainnya untuk mendorong PLN membuat kemajuan dalam tujuan penting ini. BP juga harus berusaha melibatkan Presiden dan penasihatnya dari Papua dalam usaha ini.

2. BP harus meminta kewenangan untuk meningkatkan pasokan pembangkit listrik tenaga diesel untuk Babo, sampai PLN memperluas daya berbasis *grid* dari Tangguh ke Babo dan kampung-kampung sekitarnya. BP juga harus meminta otoritas yang bertanggung jawab, untuk menyediakan lampu solar ke setiap rumah tangga di kampung-kampung tanpa listrik, sehingga tetangga Tangguh dapat memiliki listrik yang dapat diandalkan.

G. Gas to Power

1. BP harus bekerja lebih aktif dengan Gubernur, pimpinan DPRD, dan pejabat di Jakarta untuk memastikan mereka memahami secara penuh kebutuhan akan tindakan cepat untuk membentuk dan melaksanakan BUMD, yang merupakan prasyarat dalam memulai pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk kekuatan berbasis gas.

H. Pembangunan Sosial dan Masyarakat

Kesehatan

1. BP harus terus mendukung program yang mengurangi angka kesakitan dan kematian terkait diare, TB dan HIV/AIDS. Upaya ini harus terus didukung secara aktif dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat kesehatan di Teluk Bintuni sesuai standar Indonesia.

Mata Pencaharian dan Pengembangan Usaha

2. BP harus bekerja dengan Indocater dan koordinator kampung untuk mencapai komitmen AMDAL TEP-nya yaitu mendapatkan 10% kebutuhan pangan segar TEP selama konstruksi dan 65% pasca konstruksi.

Peningkatan produksi oleh koperasi ini mungkin memerlukan perluasan *stocking point* dan / atau pengangkutan barang yang lebih sering.

3. BP harus melembagakan mekanisme pemantauan secara cermat terhadap pengadaan barang-barang lokal oleh kontraktor, untuk memastikan bahwa komitmen AMDAL-nya telah dipenuhi dan meminta agar setiap kekurangan segera ditangani. Jika tidak dikoreksi, BP harus mengajukan denda berdasarkan kontrak, yang dapat diinvestasikan untuk fasilitas dan perlengkapan koperasi.

4. Unit terkait Pengadaan dan Pengadaan Rantai Pasokan BP harus menggali peluang untuk produk atau jasa lainnya yang dapat disuplai oleh masyarakat lola yang ahli, serta perusahaan dari masyarakat asli yang terlatih. Sejauh ini, satu-satunya kontrak yang telah diberikan kepada peserta adalah Koperasi Mayri dan Koperasi Raja Barefal untuk penyediaan alat tulis kantor (ATK) dan Subitu Kreasi Busana untuk seragam.

5. Bisnis masyarakat asli (SUBITU) merupakan elemen penting pembangunan Papua. Kegagalan salah satu dari bisnis SUBITU akan berdampak buruk pada keseluruhan program pengembangan perusahaan BP. BP harus terus memelihara bisnis ini karena mereka berusaha keras untuk menjadikan perusahaannya menguntungkan.

Kompensasi Adat

6. BP harus terus menolak usulan apapun bahwa BP harus membayar klaim adat yang diakui oleh pemerintah, dan termasuk pembayaran dalam pemulihan biaya. Jika Pemerintah Indonesia menuntut agar BP membayar klaim semacam itu, maka uang tersebut tidak dapat dilakukan secara tunai atau setara. Jika pembayarannya harus melibatkan BP, maka harus sepenuhnya transparan, dan berbentuk dana untuk program atau program tertentu yang menguntungkan masyarakat adat.

Pendidikan

7. Sekolah unggulan adalah satu-satunya unsur dukungan BP yang paling penting bagi pendidikan lokal. Sudah lama tertunda. BP harus bekerja sama dengan dinas pendidikan setempat dan mitra pendidikannya untuk membuat pembentukan satu sekolah unggulan tepat waktu di Teluk Bintuni sebagai prioritas. Sekolah harus berfungsi sepenuhnya, paling lambat, saat Kilang 3 beroperasi dimulai.

IV. BERITA TERKINI MENGENAI POLITIK DAN KEAMANAN

A. Nasional

Presiden Joko Widodo menikmati tingkat kepuasan publik yang tinggi, di tahun ketiga dari masa jabatan lima tahunnya.¹⁶ Sejak awal mula menjabat dengan mayoritas dukungan kecil, yang tidak stabil di DPR, saat ini dia telah menciptakan koalisi mayoritas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini termasuk partai-partai yang beragam seperti PDI-P, masih diketuai oleh mantan Presiden Megawati; Golkar, partai warisan Soeharto; Hanura, dikepalai oleh mantan Jenderal Wiranto; NasDem, partai pro-bisnis yang didirikan oleh tokoh media Surya Paloh; dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dua partai Islam kecil. Sementara koalisi ini secara teknis menjamin Presiden mendapatkan dukungan cukup besar dari DPR, namun memaksa dia untuk menunjuk pemimpin politik dari partai koalisi ke banyak posisi terpenting di pemerintahan. Keanekaragaman politik ini tidak mudah beradaptasi dengan kebijakan yang terkoordinasi dan konsisten.

Konsistensi sangatlah penting di beberapa area yang diatur secara ketat seperti contoh investasi bisnis asing atau peraturan minyak dan gas bumi, karena keputusan di area ini seringkali memerlukan koordinasi atau kesepakatan beberapa departemen. Namun, banyak departemen yang dipimpin oleh seorang pemimpin dari salah satu mitra koalisi, agenda mereka mungkin tidak sesuai dengan Presiden atau dengan Menteri lainnya. Akibatnya, terlepas dari upaya Presiden untuk memperbaiki iklim usaha dan daya saing Indonesia, hanya sedikit yang telah dilakukan yang dapat mendorong investasi minyak dan gas swasta atau mempercepat laju pengambilan keputusan.

DPR dipimpin oleh pemimpin Golkar Setya Novanto, yang tetap bertahan meski ada banyak skandal mengenai kasus suap dan ketidakjujuran dalam hal keuangan.¹⁷ DPR telah terperosok dalam upaya untuk menolak atau menghentikan Komisi Antikorupsi, yang telah mengajukan tuntutan, umumnya melibatkan penyuapan atau suap, terhadap banyak anggota DPR (dan juga pejabat daerah dan lokal).

Berkenaan dengan kebijakan energi, DPR telah mempertimbangkan undang-undang minyak dan gas baru selama beberapa tahun. Hal ini selanjutnya dapat mengkodifikasi keunggulan Pertamina baik dalam kegiatan hulu dan hilir dan dapat mengakhiri penggunaan Kontrak Bagi Hasil ("PSC") sebagai metode untuk mengkompensasi

¹⁶ Pemilihan baru-baru ini menunjukkan bahwa peringkat persetujuannya sekitar 66%. La Batu, Safrin. "Jokowi's Approval Rating Remains High." The Jakarta Post, pada 12 September tahun 2017, www.thejakartapost.com/news/2017/09/12/jokowis-approval-rating-remains-high.html.

¹⁷ Pada saat penerbitan laporan ini, Golkar mengambil langkah yaitu menggantikan Novanto dengan Airlangga Hartarto, Menteri Industri Presiden Jokowi, sebagai kursi baru partai tersebut. Setya Novanto direkam karena berusaha menyuap Freeport untuk menjual saham divestasi pemerintah kepadanya, menunjukkan bahwa dia dikirim oleh Menteri Koordinator Bidang Keamanan atas nama Presiden. Dalam hasil putusan pengadilan yang dipertanyakan, dia berhasil memberhentikan dakwaan, dan diangkat kembali sebagai Pembicara. Dia sekarang sedang diselidiki atas tuduhan kasus korupsi yang terpisah, terkait dengan suap pada program kartu identitas elektronik nasional Pemerintah Indonesia. Dia ditangkap oleh KPK pada 20 November 2017. Lihat "Indonesia's Parliament Speaker Taken into Custody by Anti-graft Agency" Reuters, 20 November tahun 2017.

pengembang blok minyak dan gas baru dan dapat mengubah peran SKK Migas. Akan tetapi masih belum jelas apakah undang-undang baru tersebut akan segera selesai dalam waktu dekat. Dan kemungkinan besar ketentuan baru itu akan mempengaruhi proyek yang ada seperti TEP, pasti bisa mempengaruhi operasi atau perluasan masa depan di Tangguh. Bahkan tanpa adanya perubahan hukum, Pertamina meningkatkan dominasinya dalam kegiatan hulu dan didorong untuk meniru monopoli minyak milik negara lain yang sukses, seperti Statoil dan Petronas.

Banyak keputusan spesifik yang mempengaruhi Tangguh dan TEP memerlukan persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM"), Kementerian Keuangan dan regulator hulu SKK Migas. ESDM telah mengusulkan untuk mengubah sistem PSC untuk kontrak masa depan dan malah memberikan pengembang dengan "pembagian pendapatan kotor (gross revenue split)", dimana pengembang mendapatkan persentase pendapatan tetap setiap tahun dan harus menanggung semua biaya pembangunan tanpa pemulihan biaya bersama. Perubahan ini diusulkan untuk membatasi jumlah biaya yang dipulihkan oleh penghasil, dan memberikan kepastian pendapatan yang lebih besar. Namun, kecuali jika diubah, syarat untuk proyek pengembangan Tangguh merupakan pengecualian dari Kontrak Bagi Hasil yang mengatur tanggung jawab masing-masing pihak dan alokasi pendapatan. Dengan demikian, Tangguh tidak boleh terpengaruh oleh program baru kontroversial ESDM. Meskipun peraturan tersebut telah direvisi untuk mengatasi masalah industri, ESDM mengalami kesulitan untuk menarik investasi asing baru dengan menggunakan skema ini.

Peristiwa politik yang paling signifikan tahun ini, dipublikasikan dengan baik ke seluruh dunia, yaitu mengenai kekalahan Gubernur Kristen Tiongkok yang populer di Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ("Ahok") dan dua tahun penjara atas penghukuman terhadap kasus penghujatan.¹⁸ Ahok adalah Wakil Gubernur Jokowi. Ia menjadi Gubernur saat Presiden Jokowi memenangkan kursi kepresidenan. Sebelum kekalahannya, Ahok menikmati peringkat kepuasan public atas pekerjaannya sebesar 70%, namun hanya menerima 42% suara. Dia adalah sasaran kampanye media tradisional dan sosial yang terorganisir yaitu kombinasi radikal konservatif dan berbagai kelompok kepentingan. Ini termasuk Probowo, yang kalah dari Presiden Jokowi pada tahun 2014, dan kemungkinan akan menjadi kandidat presiden pada tahun 2019. Kekuatan politik dari gerakan komunitas Muslim konservatif, menyebabkan Presiden Jokowi menghadiri salah satu demonstrasi massa anti-Ahok terbesar.¹⁹

Beberapa analis percaya bahwa kasus ini bersifat politis: kesempatan satu kali bagi para pemimpin oposisi untuk menjatuhkan target yang mudah, yang tidak pernah terpilih dengan sendirinya, dan merupakan sekutu dekat Presiden Jokowi. Sektarian dan yang lain percaya bahwa kasus ini, mungkin merupakan awal pergeseran signifikan dalam politik Indonesia

¹⁸ Tuduhan penghujatan diratakan setelah komentar Ahok dibuat di awal kampanye yang menunjukkan bahwa dia tidak percaya bahwa Quran melarang umat Islam untuk memilih pemimpin non-Muslim. Keputusan penghujatan pengadilan tersebut, yang dikatakan paling rumit, didasarkan pada pandangan bahwa seorang non-Muslim tidak dapat menafsirkan ketentuan Alquran.

¹⁹ Presiden Jokowi tidak berbicara dalam demonstrasi tersebut. Diperkirakan setidaknya 500.000 orang berpartisipasi dalam salah satu demonstrasi anti-Ahok di luar Istana Kepresidenan.

yang mengarah ke Islam yang lebih konservatif dan minim toleransi terhadap Muslim non-Sunni, terutama terhadap masyarakat etnis Tiongkok dan Kristen, tetapi juga orang Syiah dan sekte Muslim lainnya. Kasus ini jelas memiliki unsur politik dan sektarian yang signifikan. Taktik ini cenderung tercermin dalam kampanye presiden melawan Presiden Jokowi yang telah dimulai. Sementara partai politik Islam terus memberikan hanya sekitar 10% suara rakyat, partai politik besar sekarang meningkatkan daya tarik mereka terhadap konservatif religius.

Presiden Jokowi tidak dipandang sebagai seorang Muslim yang taat, dan telah diserang di media sosial karena dianggap sebagai pro-China, seorang ateis dan komunis. Presiden menanggapi serangan tersebut dengan mencoba untuk memperluas daya tariknya kepada Muslim konservatif sambil mengumpulkan dukungan untuk menjunjung prinsip-prinsip dasar toleransi dan keragaman Indonesia, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 sebagai Pancasila.²⁰ Namun, sudah jelas bahwa kampanye politik yang tidak etis dan tidak benar di media sosial yang sangat mengakar dalam budaya Indonesia, akan memainkan peran penting dalam pemilihan umum mendatang. Faktor-faktor ini akan berjalan sampai tingkat tertentu pada tahun 2018, ketika ada beberapa gubernur penting di Jawa dipertaruhkan. Tapi mereka akan lebih dimanifestasikan kembali dalam kampanye pemilihan kembali Presiden Jokowi di tahun 2019, terutama jika lawannya adalah Prabowo.

Perkembangan terorisme di Indonesia telah menjadi masalah yang serius, namun polisi nasional berhasil mengatasi kemungkinan serangan teroris atau membatasi korban dari sedikit pergerakan terorisme yang telah dilakukan. Serangan paling berat terjadi di Jawa yaitu kebanyakan di Jakarta Pusat. Teroris radikal di Indonesia berasal dari sel yang tumbuh di daerah pedalaman dan beberapa masyarakat Indonesia yang pulang dan mengalami radikalisisasi dalam perang di Suriah. Indonesia memiliki program de-radikalisisasi komprehensif untuk para migran yang kembali yaitu dengan diwawancarai, dipantau, dan diberi kesempatan kerja untuk mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat. Pada titik ini, Badan Koordinasi Penanggulangan Terorisme Nasional ("BNPT") tidak melihat adanya aktivitas atau ancaman teroris di Papua, dan tidak yakin salah satu dari migran tersebut kembali ke Papua.

BNPT telah melakukan kajian terhadap keamanan infrastruktur energi nasional, khususnya pada aset vital, berkoordinasi dengan ESDM. Sebagai bagian dari tinjauan ini, satuan tugas BNPT melakukan kunjungan lapangan intensif ke Tangguh (dan fasilitas lainnya). Mereka menyimpulkan bahwa Tangguh memiliki keamanan terbaik dari fasilitas apapun di Indonesia dan aman dari serangan radikal. Kesimpulan ini karena karakteristik Tangguh yang unik yaitu termasuk lokasi yang terpencil dan tidak dapat diakses; keberhasilan ICBS;

²⁰ Raja Salman, Arab Saudi, mengunjungi Indonesia pada bulan Juni 2017, yang merupakan kunjungan pertama untuk seorang Raja Saudi setelah beberapa dekade. Presiden Jokowi memperlakukan kunjungan tersebut dengan sangat hormat dan meriah, beliau mengharapkan banyaknya pengumuman investasi dan kesepakatan bisnis. Sebagai gantinya, diyakini bahwa Raja Salman memusatkan perhatian pada upaya mencari izin bagi Yayasan Saudi untuk memperluas jaringan universitas mereka. Yayasan Wahabi telah mendanai sekolah dasar dan menengah di Indonesia selama beberapa dekade.

dan dukungan proyek dari masyarakat setempat. Akan tetapi juga karena BNPT melihat minimnya ancaman teroris di Papua Barat.

Kajian BNPT membahas keamanan fisik pada titik masuk dan akses untuk orang, kendaraan dan kapal, sistem pagar dan keamanan perimeter lainnya, serta masalah keamanan personil yang dapat diakibatkan oleh perekrutan atau infiltrasi yang lemah. BNPT berencana menerbitkan SOP untuk para produsen migas dalam waktu dekat, untuk mendorong langkah-langkah efektif dalam meningkatkan keamanan terorisme. BP harus meninjau ulang SOP ini secara hati-hati untuk menentukan apakah ada perbaikan tambahan yang harus dilakukan, namun tidak perlu menunggu SOP tersebut sebelum mengadopsi salah satu rekomendasi Panel yang diuraikan di bawah ini untuk meningkatkan keamanan Tangguh.

Secara terpisah, SKKMigas juga mengungkapkan keprihatinannya tentang keamanan di tingkat nasional, termasuk potensi terorisme dari migran ISIS yang kembali. Baru-baru ini, diadakan sebuah konferensi untuk kontraktor migas guna membahas dan berbagi gagasan mengenai praktik keamanan. Kepala SKKMIGAS sedang menjajaki potensi untuk melakukan konferensi semacam itu secara berkala, dengan kontraktor keamanan, untuk menilai ancaman, meninjau ulang teknologi baru dan berbagi praktik. Ketua juga mencatat kerentanan tertentu dari fasilitas lepas pantai, termasuk platform Tangguh, dan persyaratan keamanan khusus yang dibutuhkan. Kepala SKKMIGAS menyarankan untuk meningkatkan komunikasi yang lebih terkoordinasi dengan Angkatan Laut.²¹

B. Papua Barat

Kebijakan Presiden Jokowi terhadap Papua sebagian besar didasari oleh pembangunan ekonomi, bersamaan dengan meningkatnya perhatian dan rasa hormat atau terhadap masyarakat adatnya. Presiden Jokowi telah mengunjungi Papua lebih dari Presiden sebelumnya dan beliau menunjukkan ketertarikan besar untuk mendukung orang Papua dan melestarikan budaya mereka.²² Salah satu fokus Presiden Jokowi adalah membangun infrastruktur, termasuk bandara, pelabuhan dan jalan untuk memacu pembangunan ekonomi. Perubahannya sudah cukup dramatis. Baik di Manokwari maupun Sorong, sudah memiliki terminal bandar udara yang modern; dan jalan beraspal antara Manokwari dan Bintuni hampir selesai. Peningkatan aktivitas komersial sudah terbukti.

Tujuan ekonomi kedua adalah penyetaraan harga di Papua dengan wilayah lainnya. Harga untuk semua komoditas di Papua selalu jauh lebih tinggi karena biaya transportasi dan distribusi yang juga cukup tinggi. Meskipun tujuannya adalah penyetaraan harga untuk semua komoditas dan barang, kenyataannya adalah bahwa pemerintah pusat memiliki kontrol yang minim atas harga beras, semen, aspal atau produk konsumen. Satu-satunya komoditi yang dapat dikontrol secara signifikan adalah bahan bakar, karena dipasarkan oleh BUMN Pertamina. Dan bahkan harga BBM tersebut masih belum setara di daerah

²¹ Pangkalan Angkatan Laut terdekat ada di Sorong. Angkatan Laut melakukan patroli di Teluk Bintuni pada waktu tertentu.

²² Presiden Jokowi awalnya berjanji untuk mengunjungi Papua setidaknya tiga kali dalam setahun, dan membangun sebuah rumah kepresidenan di sana.

perkampungan Papua.²³ Sehingga, meski berniat baik, kebijakan ini belum memiliki efek yang diinginkan dan butuh melakukan intervensi lebih jauh untuk mencapainya.

Presiden Jokowi juga berusaha meredakan ketegangan atas pelanggaran hak asasi manusia dan penangkapan demonstran Papua. Presiden belum berhasil dalam pernyataan awal mengenai pengampunan dan pembebasan tahanan politik Papua; Presiden juga tidak menghilangkan persyaratan bahwa orang asing harus mendaftar dan menerima persetujuan pemerintah ("SKJ") sebelum melakukan perjalanan ke Papua.²⁴

Ada beberapa bentrokan dan penembakan di Papua antara penduduk kampung dan aparat keamanan, termasuk Polisi TNI dan Brimob, selama masa jabatan Presiden Jokowi. Insiden ini, meski serius, sangat terisolasi dan spesifik untuk lokasi mereka. Kejadian tersebut tidak ada yang terjadi di Papua Barat dan ketegangan ini tidak terlihat di Teluk Bintuni. Ada indikasi bahwa kepala polisi nasional, Jenderal Tito Karnavian, yang sebelumnya adalah Kapolda Papua, menganggap bahwa perlakuan kasar terhadap orang Papua tidak dapat diterima, dan akan secara tegas mendisiplinkan polisi yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia.²⁵

Papua Barat untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah Komando Regional TNI yang otonom, dipimpin oleh seorang Pangdam yang saat ini merupakan penduduk asli Papua. Dengan demikian, sekarang ini Papua Barat terlepas dari komando TNI Cenderawasih di Papua, beserta aneka sejarahnya tentang hak asasi manusia. Komando TNI baru ini merupakan tambahan dari komando polisi yang juga baru dibentuk di Papua Barat, dipimpin oleh seorang Kapolda (didirikan 3 tahun yang lalu). Keduanya berada di Manokwari. Oleh karena itu, untuk pertama kalinya sejak provinsi ini didirikan, Papua Barat sekarang diperlakukan secara terpisah dari provinsi Papua oleh aparat keamanan nasional. Ini sudah lama direncanakan dan berpotensi mengubah dinamika keamanan di Papua Barat.

TIAP memiliki beberapa kekhawatiran bahwa Kapolda atau Pangdam yang baru di Papua Barat mungkin berusaha memasukkan pasukan keamanannya agar lebih aktif pada keamanan Teluk Tangguh dan Bintuni, terutama sejak TEP dijadikan proyek prioritas nasional. Pangdam baru secara signifikan kekurangan tenaga kerja dan dana. Namun, Pangdam mencatat bahwa TNI berencana membentuk sebuah Korem baru (sebuah komando TNI pada pembinaan dan operasional kewilayahan) di Bintuni. Mengingat pesatnya pertumbuhan Bintuni dan struktur TNI yang terdistribusi, hal ini tidak mengherankan. Dengan sendirinya, hal ini tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan ICBS atau Tangguh. Pangdam menyatakan ketertarikannya pada *soft power*, seperti contoh membuat TNI lebih terlibat dalam kegiatan pengembangan masyarakat dan infrastruktur.

²³ Lihat Kesetaraan: One-Price Fuel in Papua is Constrained, Kompas. Pada 29 September tahun 2017.

²⁴ Lihat Laporan TIAP, Desember 2015 di halaman xx. Saat ditanya oleh TIAP, tujuan persyaratan SKJ digambarkan tidak untuk mencegah atau menghalangi seseorang bepergian ke Papua, namun hanya agar pemerintah dapat mengetahui siapa yang ada disana demi kepentingan perlindungan mereka sendiri.

²⁵ Lihat, misalnya, "Police Chief Tito Karnavian building a better culture", Reformasi, pada 23 April tahun 2017.

Kapolda mengungkapkan beberapa kekhawatiran spesifik tentang ancaman keamanan yang melekat pada ribuan masyarakat non-Papua yang mulai datang bekerja di TEP. Kapolda menyarankan untuk melakukan pemeriksaan latar belakang yang lebih menyeluruh, dan meningkatkan intelijen. Hal ini tentu merupakan area yang harus ditangani oleh BP dan keamanan kontraktornya sebagaimana telah direkomendasikan dalam laporan ini. Kapolda juga khawatir bahwa waktu respon yang dibutuhkan garnisun polisi setempat di Bintuni agar bisa sampai di Tangguh dalam situasi darurat tidaklah cukup. Beliau menyarankan untuk menempatkan sebuah unit polisi kecil atau garnisun TNI di atau dekat Tangguh. Unit tersebut pasti dapat memberikan respon yang lebih cepat terhadap ancaman yang segera membutuhkan intervensi polisi, namun juga akan mengubah keseimbangan antara keamanan internal dan publik di Tangguh dan dapat menimbulkan risiko bagi ICBS.

Gubernur Papua Barat yang baru, Dominggus Mandacan, dan Wakil Gubernurnya mulai menjabat sejak bulan Mei 2017. Gubernur juga merupakan Kepala dari salah satu suku penting di Papua Barat, suku Arfak, yang terletak persis di sebelah utara suku Teluk Bintuni. Beliau umumnya mendukung Tangguh, namun kemungkinan ingin membuat catatan tentang kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, Gubernur meminta agar program perumahan di pantai utara ditunda, paling tidak sampai diadakannya gelar tikar adat untuk menentukan apakah ada kesepakatan mengenai ruang lingkup dan ukuran program tersebut. Gubernur juga telah melakukan tinjauan lebih lanjut dan hampir menyelesaikan proses finalisasi peraturan daerah khusus (Perdatus) di bawah Otonomi Khusus, yang akan mengalokasikan pendapatan bersama dari Tangguh dan produsen minyak dan gas lainnya di antara provinsi, kabupaten dan suku adat.²⁶

Petrus Kasihw, seorang Bupati dan Wakil Bupati yang juga baru pada tahun 2016. Bupati sangat mendukung Tangguh, dan mengharapkan BP untuk memberikan pembangunan ekonomi, pelatihan tenaga kerja dan pekerjaan kepada masyarakat Bintuni. Bupati fokus pada perbaikan infrastruktur Bintuni, termasuk sistem pelabuhan, bandara dan transportasi, yang membutuhkan modernisasi. Namun, dia menyetujui penundaan program perumahan di pantai utara, sambil menunggu gelar tikar adat, beliau mencatat bahwa ada perbedaan didalam masyarakat mengenai jumlah rumah dalam program tersebut. Meski status program sudah siap, program tersebut tidak bisa dimulai tanpa dukungannya, dan beliau baru saja memberikan dukungan.²⁷ Beliau juga memahami keterbatasan pengalamannya dalam pemerintahan dan menyambut baik dukungan BP untuk pembangunan kapasitas pemerintah, yang telah lama absen selama lebih dari dua tahun.²⁸

²⁶ (Catatan: TIAP diberitahu bahwa anggota baru MRP dipasang pada akhir November, menghapus satu penghalang dan mungkin mengizinkan proses finalisasi Perdatus untuk bergerak maju.)

²⁷ Pada awal Desember, Bupati mengakhiri penangguhan program tersebut. TIAP berharap konstruksi bisa segera dimulai. Keterlambatan program perumahan untuk desa-desa di pantai utara kemungkinan akan berdampak pada penundaan elektrifikasi di desa pantai utara, karena PLN telah menunda mengaitkan desa-desa tersebut dengan grid yang sudah dibangun sampai program pembangunan perumahan selesai.

²⁸ Lihat Laporan TIAP 2015 halaman 45.

Status Otonomi Khusus Papua terus memberikan arus pendapatan tambahan yang substansial ke Papua.²⁹ Status tersebut sebagian besar diatur oleh formula pembagian pendapatan dari undang-undang Otonomi Khusus yang disahkan pada tahun 2001.³⁰ Hal ini telah memberikan tambahan pendapatan umum dan dana tambahan lain yang didedikasikan untuk infrastruktur di Provinsi (sekarang dua provinsi) selama 25 tahun.

Otonomi Khusus juga memberikan pendapatan tambahan yang substansial dari produksi sumber daya alam di kedua provinsi tersebut. Untuk gas alam, ini membalikkan pemangkasan pendapatan 70% / 30% yang berlaku di tingkat nasional antara Pemerintah Indonesia dan provinsi lainnya, memberikan 70% dari pendapatan setelah pajak ke provinsi tersebut. Pendapatan dari LNG Tangguh mewakili hampir 35% dari pendapatan daerah Papua Barat pada tahun 2017. Namun sebagian besar pendapatan yang dialokasikan ke Papua Barat dan Teluk Bintuni belum diserahterimakan dan direalisasikan. Pada 2016, hanya 30% dari pendapatan sumber daya alam yang dialokasikan direalisasikan oleh Provinsi, dan hanya 12% dari pendapatan yang dialokasikan direalisasikan oleh Kabupaten. 70% yang diberikan ke provinsi terbagi oleh formula pembagian pendapatan, dimana 6% langsung masuk ke provinsi, 12% ke kabupaten penghasil dan 12% ke kabupaten lainnya. Sisanya 40% dimaksudkan untuk dialokasikan oleh peraturan daerah khusus, Perdasus, yang telah dinegosiasikan oleh para pihak selama lebih dari satu dekade. Meskipun kesepakatan mengenai peraturan ini nampaknya telah tercapai dua tahun lalu, terdapat perubahan di DPRD provinsi, dan juga MRP sekarang menunda ratifikasinya.

Rancangan Perdasus secara langsung membahas kebutuhan akan kompensasi adat kepada suku-suku Papua, yang merupakan permintaan suku-suku pantai utara yang dilakukan secara persisten. Rancangan tersebut menetapkan bahwa setengah dari pendapatan yang dialokasikan, atau 20% dari total, didedikasikan untuk dana perwalian adat yang akan dibagikan untuk pendanaan pembangunan saat ini dan penyediaan kebutuhan masyarakat adat di masa mendatang.³¹ Status dan pandangan untuk peraturan ini tidak jelas, mengingat Gubernur dan Bupati baru, pada titik tertentu, merupakan anggota baru MRP, yang berarti semuanya harus setuju.

Terpisah dari masalah adat Perdasus, suku Sebyar di pantai utara telah lama mengklaim hak untuk diberi kompensasi di bawah adat terkait sumur yang dibor di lahan milik masyarakat.³² Dibawah formula yang tidak diperdebatkan, klaim suku Sebyar adalah sebesar Rp. 60 miliar, dengan tarif Rp. 10 miliar per sumur. BP selalu memastikan bahwa pembayaran atau penyelesaian klaim ekstra legal lainnya harus menjadi tanggung jawab

²⁹ Dana Otonomi Khusus untuk Papua Barat pada 2018 akan menjadi Rp 4 triliun, tambahan menjadi sekitar Rp 23,85 triliun pada transfer fiskal lainnya dari Pemerintah Indonesia. Lihat radarsorong.com, pada 20 Desember tahun 2017. Untuk penjelasan lengkap mengenai ketentuan pendanaan Otonomi Khusus, lihat Laporan TIAP Desember 2015 halaman 22 dan TIAP Mei 2014 halaman 50-51.).
December 20, 2017. For a full description of the Special Autonomy funding provisions, see TIAP December 2015 Report at 22 and TIAP May 2014 Report at 50-51.

³⁰ Undang-Undang 26-2001. Lihat Laporan TIAP October 2012 halaman 39-42.

³¹ Untuk penjelasan lengkap tentang alokasi pendapatan dan draft Perdasus. Lihat Laporan TIAP May 2014 halaman 50-51.

³² Sumur yang telah dibor baik di darat dan lepas pantai merupakan daerah yang dianggap sebagai tanah Sebyar. Kemungkinan, akan ada lebih banyak sumur yang dibor di daerah ini di masa mendatang.

pemerintah, baik secara langsung atau sesuai dengan Perdasus, dan tidak dapat dibayar oleh operator. Sebagian dari klaim tersebut, Rp. 6 miliar, telah dibayarkan oleh pemerintah daerah secara tunai, pada tahun 2009. Sisanya, Rp. 54 miliar telah diterima sebagaimana diminta untuk dibayar oleh pemerintah dan telah dialokasikan di antara Pemerintah Indonesia, provinsi dan kabupaten. Bagian yang dianggap tanggung jawab provinsi dan kabupaten, sebesar Rp. 22 miliar telah dibayar secara tunai, kepada para pemimpin suku.

Porsi yang dianggap sebagai tanggung jawab Pemerintah Indonesia, sebesar Rp 32 miliar, masih belum dibayar. Pemerintah Indonesia telah menerima klaim ini sebagai tanggung jawabnya, namun belum dilaksanakan oleh ESDM, SKKMigas atau Kementerian Keuangan. Beberapa pejabat di Pemerintah Indonesia dapat meminta BP, sebagai operator PSC, membayar klaim tersebut, dan memasukkan pembayaran dalam biaya pemulihannya. BP menolak saran semacam itu, dan harus terus melakukannya. Jika Pemerintah Indonesia menuntut agar BP membayar klaim ini, pembayaran tidak dapat dilakukan secara tunai atau setara. Jika pembayarannya harus dilakukan melalui BP, maka harus sepenuhnya transparan, dan berbentuk dana untuk program atau suatu program tertentu yang menguntungkan masyarakat adat.

C. Tangguh

Keamanan fisik untuk operasi Tangguh sebagian besar diatur oleh prinsip-prinsip ICBS dan persyaratan JUKLAP / PAMBERS dengan komando polisi daerah.³³ Struktur ini telah bekerja dengan baik sejak awal dibentuk selama konstruksi Kilang 1 dan 2. Insiden kekerasan atau ancaman gangguan jarang terjadi, dan biasanya masalah terkait dengan masalah pribadi atau tempat kerja, seperti kompensasi pekerja, perekrutan atau pemecatan. Polisi hanya dipanggil beberapa kali, terutama dalam situasi yang berkaitan dengan pelanggaran zona maritim yang mengelilingi dermaga dan pelindung pelabuhan dan demonstrasi di Babo.

Keamanan fisik untuk TEP, baik darat maupun untuk semua aktivitas garis pantai dan kelautan di dalam zona eksklusif lepas pantai, merupakan tanggung jawab kontraktor, dan diatur oleh persyaratan Kontrak EPC.³⁴ Kontrak tersebut mensyaratkan CSTS dan subkontraktornya untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur keamanan BP, untuk mengembangkan rencana keamanan demi mengamankan lokasi, menetapkan dan memelihara tingkat koordinasi yang sesuai dengan BP dan mencakup pemantauan, audit dan proses verifikasi untuk mengevaluasi rencana.

Cybersecurity adalah bagian yang terpisah dari keamanan Tangguh yang cukup kritis. Saat ini, pertahanan BP terhadap ancaman keamanan dunia maya di Tangguh sangat

³³ JUKLAP / PAMBERS adalah kesepakatan yang semula dinegosiasikan antara BP dan komando polisi regional untuk menentukan peran pasukan keamanan swasta dan publik dalam menanggapi insiden tersebut, pelatihan yang diberikan untuk hak asasi manusia dan penggunaan kekerasan, dan persyaratan latihan gabungan tahunan. Sejak Tangguh dinyatakan sebagai aset nasional yang vital, JUKLAP / PAMBERS menjadi kesepakatan antara SKKMigas dan polisi daerah. Namun, istilahnya belum berubah.

³⁴ Kontrak untuk pengembangan teknik, pengadaan dan konstruksi (EPC) LNG *onshore*, untuk proyek perluasan Tangguh No. 4420001030 Bagian IV Kesehatan, Keselamatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan Hidup.

dipikirkan secara detail. Mengingat potensi konsekuensi atas serangan yang sukses dan evolusi peretasan global (*global hacking*) yang terus berlanjut, penting bagi BP untuk mempertahankan prosedur yang ketat dan canggih, dan persyaratan tersebut harus ditinjau secara berkala. Sebagian besar standar spesifik ditetapkan oleh persyaratan BP Group Security, yang juga melakukan audit terhadap ancaman *cyber* setiap dua tahun sekali. Penting bahwa semua karyawan yang memiliki akses ke sistem operasi Tangguh diberikan pelatihan keamanan online secara reguler. Hal ini juga penting bahwa sistem operasi dan produksi Tangguh benar-benar terputus dari internet, dan tidak dapat diakses oleh orang lain selain personil Tangguh yang berwenang dengan banyak lapisan keamanan. TIAP juga sangat mendukung audit dua tahunan BP Group mengenai *cybersecurity*.

Sesuai dengan Persyaratan BP mengenai Ruang Lingkup Keamanan Darat, CSTS telah mempersiapkan Rencana Pengelolaan Keamanan yang ekstensif dan menyeluruh. Rencana ini telah merinci peran dan tanggung jawab semua manajer keamanan proyek yaitu menjelaskan kebijakannya, yang sejalan dengan Kode Etik BP dan kebijakan keberlanjutannya. Rencana tersebut tidak mencakup persyaratan atau koordinasi khusus terkait *cybersecurity*. Rencana ini menentukan semua langkah-langkah mitigasi keamanan darat dan lepas pantai, termasuk rekrutmen dan pelatihan untuk pasukan penjaga keamanan, langkah-langkah keamanan perimeter, kontrol akses, patroli kendaraan, kapal dan patroli kaki, komunikasi, intelijen, krisis dan manajemen darurat, sistem pemantauan dan audit, dan tindakan remedial untuk memperbaiki kekurangan. Rencana ini mengakui prinsip-prinsip ICBS dan perlunya kepatuhan terhadap norma hak asasi manusia internasional, termasuk Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia dan Prinsip Sukarela. Rencana tersebut memerlukan koordinasi reguler yang rinci dengan BP, komunikasi darurat dari semua insiden dengan manajer keamanan BP dan latihan keamanan tahunan bersama.

Dengan persyaratan yang komprehensif serta tingkat detailnya, rencana tersebut berusaha untuk menyampaikan tingginya prioritas untuk keamanan yang efektif di semua bagian TEP. Sangat penting bahwa rencana ini terus dilaksanakan pada level tingkat tinggi, secara sepenuhnya dan benar, terutama karena rencana ini diberlakukan di antara semua subkontraktor. Selain itu, berdasarkan pengalaman yang sedang berlangsung, seiring dengan meningkatnya mobilisasi pekerja, modifikasi perlu dilakukan untuk memperbaiki rencana dan setiap kekurangan yang dirasakan harus diperbaiki.

Sesuai dengan Rencana Keamanannya, CSTS memiliki kontrak dengan Gardatama yaitu penyedia keamanan yang saat ini digunakan oleh BP di Tangguh. Gardatama mulai mempekerjakan petugas keamanan internal, dan diperkirakan akan mempekerjakan sekitar 160 petugas keamanan. Sejauh ini, dengan sekitar 1000-2000 pekerja TEP di atas kapal, pihaknya telah memobilisasi sekitar 134 petugas keamanan. Penjaga TEP akan menjalani pelatihan dasar tentang semua aspek keamanan selama dua minggu. Mereka mungkin memiliki sedikit pengalaman atau tidak sama sekali dalam keamanan, dan tidak ada pelatihan khusus untuk perlindungan hak asasi manusia atau penggunaan kekuatan yang tepat. Petugas keamanan ini akan bertanggung jawab untuk mengelola setiap perselisihan atau gangguan yang timbul di kamp pekerja yang menampung ribuan karyawan kontraktor dari seluruh Indonesia.

BP telah menyadari pentingnya pelatihan lanjutan bagi para petugas keamanan. Pada tahun lalu, karena parahnya potensi konsekuensi kekerasan dari individu yang radikal atau tidak stabil, keamanan BP telah menerapkan prosedur pelatihan tambahan dan inovatif untuk petugas keamanannya dalam "*baselining*" dan "*behaviour profiling*." Inovasi ini merupakan tambahan terhadap pelatihan periodik yang diterima para petugas keamanan terkait dengan Prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia, penggunaan manajemen kekerasan dan massa, seperti yang dipersyaratkan oleh JUKLAP. Pelatihan baru ini memberikan pemahaman dasar kepada para petugas keamanan Tangguh tentang kapan mereka harus melaporkan perilaku yang disaksikan dan tidak biasa. Pelatihan ini disetujui oleh SKKMigas selama 18 bulan. Meskipun dibutuhkan, pelatihan diberikan hanya selama masa tugas keamanan, karena semua petugas harus berada di pos mereka selama 12 jam sehari. Pelatihan tidak diberikan atau ditawarkan kepada petugas keamanan TEP.

Di bawah ICBS, tidak ada petugas keamanan publik di lokasi. Dukungan polisi akan dipanggil oleh keamanan BP hanya jika dibutuhkan. Kantor kepolisian terdekat ada di Bintuni, dan ada juga polisi kecil dan detasemen TNI di Babo. Akibatnya, jika bantuan dari luar diperlukan untuk situasi darurat, mungkin hanya dibutuhkan beberapa jam sebelum pasukan tiba di lokasi. Sebagaimana dicatat, Kapolda telah menyatakan keprihatinannya tentang tidak memadainya kemampuan respon cepat bagi pasukan polisi untuk menanggapi insiden darurat di Tangguh. Ada pos polisi maritim kecil ("Joint Marine Patrol") di dekat lokasi LNG di desa Tenah Merah Baru. Polisi maritim ini, dua per shift, dipersenjatai minimal, dan umumnya berada di lokasi ini untuk membantu memberlakukan zona eksklusif maritim. Mereka tinggal di desa dan juga memberikan fasilitas perpolisian untuk masyarakat, yang tampaknya disambut oleh desa.

Seperti yang dinyatakan, TEP diperkirakan membawa pekerja ke lokasi sekitar 7.000 - 10.000 pekerja pada jumlah puncak. Jumlah total individu yang akan menghabiskan waktu di tempat kerja TEP akan jauh lebih besar daripada jumlah puncak, karena beberapa pekerja akan berada dalam jangka pendek dan yang lainnya akan memilih untuk tidak kembali setelah satu atau lebih 28 hari. Seperti pekerja di Tangguh, alkohol, obat-obatan terlarang dan senjata dilarang keras di kamp-kamp pembangunan. Dengan pengecualian yang sangat terbatas, tidak satu pun dari pekerja ini memiliki akses hukum ke zona operasi, walaupun kamp-kamp berada di dekat zona operasi dan pembatas fisik tidak dapat dilalui. Sementara sebagian pekerja adalah orang Papua, namun kebanyakan pekerja tidak. BP akan memiliki kontrol yang minim atau pengawasan atas rekrutmen dan pemeriksaan para pekerja ini, atau kegiatan mereka di kamp-kamp, akan diawasi dan dijamin oleh CSTS

Dengan meningkatnya ancaman yang ditimbulkan oleh masuknya ribuan pekerja yang tidak diperiksa oleh BP, dan potensi ancaman tertentu bahwa satu atau sekelompok pekerja ini dapat mencoba untuk melakukan serangan kekerasan di Tangguh, jelas bagi Panel bahwa peningkatan kapasitas baik untuk keamanan Tangguh maupun kontraktor, selama periode konstruksi, sangatlah penting dan mendesak. Salah satu upgrade yang mungkin dilakukan di tempat lain adalah dengan mempersenjatai petugas keamanan internal yang terlatih dengan senjata api atau senjata mematikan lainnya. Tapi mempersenjatai petugas keamanan internal tidak memungkinkan bagi BP di Tangguh karena hal tersebut ilegal di

Indonesia bagi siapapun selain aparat keamanan publik untuk memiliki atau membawa senjata api.

Namun, ada beberapa langkah material lain yang dapat diambil untuk meningkatkan kapasitas keamanan Tangguh dan TEP untuk kepentingan mencegah, menggagalkan, menunda atau mengalahkan tindakan kekerasan apapun, bahkan serangan bersenjata, yang mengancam personil atau fasilitas di Tangguh.

Berikut ini adalah rekomendasi spesifik yang harus dipertimbangkan oleh BP untuk meningkatkan keamanan fisik di Tangguh:

- Mengingat konsekuensi suksesnya potensi serangan cyber dan evolusi *global hacking* yang terus berlanjut, BP harus terus menerapkan prosedur yang ketat dan canggih, dan harus memeriksanya secara teratur. Semua karyawan yang memiliki akses ke sistem operasi Tangguh harus diberi pelatihan keamanan online secara reguler.
- Sistem operasi dan produksi Tangguh harus benar-benar terputus dari internet, dan akses harus dibatasi, yaitu hanya pada personil Tangguh yang berwenang dan memiliki banyak lapisan keamanan. TIAP juga sangat mendukung audit dua tahunan BP Group mengenai *cybersecurity*.
- Hal penting bahwa Rencana Pengelolaan Keamanan CSTS harus terus dilaksanakan sepenuhnya dan benar, karena rencana tersebut diberlakukan untuk semua subkontraktor. BP harus menggunakan proses koordinasi dan verifikasi dari rencana keamanan untuk mengawasi semua elemen keamanan TEP dan menuntut agar setiap aspek rencana keamanan dapat dilaksanakan sepenuhnya dan bekerja secara efektif. Selain itu, berdasarkan pengalaman, saat mobilisasi pekerja meningkat, BP harus bersikeras bahwa setiap kekurangan yang dirasakan dapat dikoreksi.
- Pelatihan lanjutan mengenai profil perilaku yang saat ini diberikan kepada penjaga keamanan Tangguh sangatlah berharga, dan harus dibuat permanen dan wajib. Penjaga yang terlatih dalam keterampilan ini juga harus ditugaskan secara teratur untuk bertugas di desa-desa terdekat yang mereka kenal. Pelatihan ini harus diberikan kepada penjaga selama jam kerja mereka, dan dipandang sebagai bagian dari tugas mereka yang dibutuhkan, reguler dan penting. Jika dibutuhkan penjaga tambahan untuk mengakomodasi persyaratan pelatihan ini, maka penjaga tambahan harus dipekerjakan.
- Pelatihan keamanan CSTS harus ditingkatkan. Meskipun penjaga ini tidak mungkin memiliki pengalaman seperti penjaga Tangguh, mereka harus dilatih dengan standar yang sama seperti yang dipersyaratkan oleh ICBS keamanan Tangguh. Kontrak EPC memberikan kewenangan bagi BP untuk menyetujui persyaratan sumber daya, pelatihan dan kompetensi untuk

semua petugas keamanan TEP sebelum melakukan mobilisasi.³⁵ BP harus meninjau ulang pelatihan yang sejauh ini telah diberikan untuk penjaga TEP, dan menentukan apakah pelatihan tersebut memberikan tingkat pelatihan dan kompetensi yang dibutuhkan di bawah ICBS dan JUKLAP. Jika tidak, modifikasi harus dilakukan.

- BP harus yakin bahwa upaya CSTS cukup memadai untuk mendeteksi kemungkinan ancaman keamanan yang hadir dari karyawan CSTS dan semua subkontraktornya. BP tidak dapat memeriksa karyawan yang dipekerjakan untuk TEP, namun BP harus meninjau semua proses pemeriksaan yang digunakan untuk meminimalkan kemungkinan pekerja yang memiliki ancaman dipekerjakan. BP juga harus segera sadar mengenai adanya pelanggaran atau perilaku tidak biasa lainnya oleh salah satu karyawan yang dapat menimbulkan ancaman. Kode Etik BP harus benar-benar ditegakkan. Karyawan harus diberi tahu bahwa kamar dan barang pribadi mereka akan dikenai inspeksi mendadak oleh petugas keamanan terkait pemeriksaan terhadap penyelundupan atau bahan radikal. Setiap hukuman yang dikenakan untuk pelanggaran perilaku tersebut harus dilakukan bersama oleh CSTS dan BP. Setiap pelanggaran berat harus mengakibatkan pemecatan tanpa ada kesempatan untuk kembali.
- Peningkatan pengumpulan informasi dari intilijen sangat penting untuk mendeteksi dan peringatan dini terhadap aktivitas tersangka. Keamanan Tangguh harus berusaha meningkatkan koordinasi dengan polisi setempat dan TNI. Penting bahwa BP harus mendorong masyarakat setempat untuk berbagi informasi tentang pendatang baru, dan kegiatan yang tidak biasa atau rahasia, termasuk kegiatan di rumah ibadah, untuk mendeteksi perilaku yang mengancam atau provokasi terkait dengan Tangguh. Karena BP menikmati kepercayaan dari banyak masyarakat setempat, hal ini mungkin merupakan salah satu alat pencegah yang paling efektif untuk setiap serangan bersenjata, atau bentuk kekerasan kecil.
- Perimeter keamanan harus ditinjau dan ditingkatkan apabila sesuai. Akan sangat tidak praktis untuk menetapkan penghalang yang tidak dapat ditembus pada batas luar yang sangat panjang di lokasi, namun pengukuran yang lebih efektif dapat digunakan untuk pengamanan yang lebih baik dan memantau lingkaran dalam, di mana semua operasi berlangsung. BP harus terus memperbaiki sistem pagarnya, serta meningkatkan penggunaan CCTV, drone dan patroli untuk memungkinkan pemantauan jarak jauh 24/7 yang lebih baik.
- Keamanan laut harus ditingkatkan lebih lanjut. Berdasarkan rencananya, CSTS harus mengerahkan tiga Kapal Keamanan dan personil darat yang bertugas untuk melindungi dan mengamankan semua wilayah pesisir dan

³⁵ Lihat Kontrak EPC, Lampiran 6, bagian 3.1 (b), Bagian IV: Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan Hidup.

laut. Akan tetapi karena akan ada begitu banyak lalu lintas di dan sekitar lokasi LNG selama konstruksi, maka penting bagi BP untuk dapat mengidentifikasi semua kapal di dekat dermaga atau *platform* sebelum mereka tiba. Berkoordinasi dengan CSTS yaitu dengan memanfaatkan radio atau komunikasi lainnya, serta CCTV, radar, lidar, atau teknologi lain yang tersedia, BP harus memfasilitasi peringatan dini tentang aktivitas laut dengan intensitas buruk. Selain itu, komunikasi reguler dengan pangkalan Angkatan Laut di Sorong harus dilembagakan melalui jalur yang tepat, terutama untuk mengkoordinasikan tanggap darurat. Potensi peningkatan kapasitas unit kepolisian laut bersama (JMP) juga harus dipertimbangkan.

- Prosedur respon cepat di lokasi untuk potensi serangan bersenjata yang dapat dibedakan dari prosedur yang digunakan untuk kebakaran, ledakan atau keadaan keselamatan darurat lainnya harus ditinjau ulang, diperbarui sebagaimana mestinya, dan dilakukan secara rutin. Sirene yang berbeda harus digunakan, dan tindakan yang direkomendasikan untuk personel harus mencerminkan pose ancaman yang berbeda. Dengan demikian, mengevakuasi titik kumpul secara cepat mungkin akan efektif untuk beberapa situasi darurat, namun berlindung di tempat atau bentuk penguncian lainnya mungkin lebih dianjurkan.
- Tindakan yang dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk menggunakan mobil, truk atau kendaraan lain yang menimbulkan malapetaka pada personel harus dipertimbangkan. Mengamankan penyimpanan kendaraan, kunci atau perangkat pengapian lainnya sangatlah penting. BP juga harus mempertimbangkan kemungkinan memasang peralatan atau perangkat lainnya, kecuali kendaraan darurat, yang membatasi kecepatan tertinggi mereka dengan kecepatan rendah yang dibutuhkan oleh kendaraan di lokasi.
- Pelatihan tahunan bersama dengan polisi dan TNI yang dipersyaratkan dalam JUKLAP harus diadakan setiap tahun, dan harus mencakup ancaman realistis atas serangan bersenjata dan sebuah praktik untuk tanggapan terkoordinasi yang secara efektif melawan ancaman tersebut, yang melibatkan keamanan Tangguh dan CSTS, seperti yang dibutuhkan polisi dan TNI. Hal ini harus menjadi program tambahan untuk latihan tahunan yang diperlukan dalam rencana keamanan CSTS.
- BP harus mendorong pengawasan dan dukungan dari SKKMigas mengadakan lokakarya untuk koordinasi reguler di antara kontraktor minyak dan gas dan para ahli sekuriti profesional untuk membandingkan ancaman keamanan, prosedur penanganan dan berbagi pengalaman praktik terbaik.
- Akhirnya, selagi kemungkinan serangan bersenjata terkoordinasi di Tangguh yang dapat menembus batas dalam sangat tipis, terutama apabila langkah-langkah yang

direkomendasikan TIAP diadopsi, meningkatkan kapasitas keamanan internal dengan senjata yang lebih efektif untuk menggagalkan serangan bersenjata semacam itu seharusnya dilakukan. Keamanan swasta harus diperbolehkan membawa senjata non-mematikan, seperti senjata gel lada, semprotan merica, peluru karet, senjata api dan perangkat lainnya. Senjata dengan tingkat kematian yang lebih tinggi ini tidak boleh dibawa oleh penjaga keamanan Tangguh biasa, namun hanya oleh para tingkat penjaga elit senior yang telah menunjukkan kapasitas mereka dan telah dilatih secara menyeluruh dalam penggunaannya. BP dapat bekerja sama dengan kontraktor keamanan untuk membentuk satpam elit untuk penjaga keamanan, dengan seragam yang berbeda, yang bisa menjadi bahan promosi bagi para penjaga dengan kinerja terbaik. Jika kontrak yang ada tidak mengizinkan peningkatan kapasitas atau struktur pasukan keamanan, maka kontrak tersebut harus didiskusikan dengan kontraktor keamanan sebagai amandemen terhadap kontrak yang ada.

V. PENGEMBANGAN TENAGA KERJA PAPUA

Salah satu komitmen BP yang paling mendasar dan dapat diukur berdasarkan AMDAL yang awal adalah untuk merekrut, melatih dan mempromosikan tenaga kerja Papua, sehingga pada tahun 2029 yaitu 20 tahun setelah operasi dimulai, masyarakat Papua memiliki 85% angkatan kerja dan sebagian besar akan menjalankan proyek wilayah Tangguh. Hal tersebut membutuhkan 78% dari semua pekerja terampil dan 33% supervisor dari Papua.³⁶

AMDAL TEP memberlakukan persyaratan tambahan pada BP mengenai perekrutan IP lokal dan penduduk lain di Teluk Bintuni dan FakFak selama masa konstruksi.³⁷ Untuk menerapkan komitmen ini, kontrak EPC mewajibkan CSTS untuk mempekerjakan pekerja Papua dari wilayah Teluk Bintuni / FakFak sebesar 45% pekerja tidak terampil, 30% pekerja setengah terampil, 2% terampil dan 1% manajer yang bekerja di lokasi tersebut.

Komitmen ini selalu dikutip oleh para pemimpin Papua sebagai salah satu warisan abadi Tangguh untuk Papua. Lebih dari satu dekade, TIAP telah meninjau kemajuan BP dalam komitmen ini, serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja. Dalam upayanya untuk mencapai komitmen AMDAL terkait 85% masyarakat Papua yang mengoperasikan Tangguh, BP telah mencapai 54% dari keseluruhan angkatan kerja pada tahun 2011. Namun, walaupun telah melakukan banyak upaya, sampai saat ini persentase tetap bertahan sekitar 54%. Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya yang lebih besar harus

³⁶ Masyarakat Papua didefinisikan sebagai masyarakat origin Papua yang didefinisikan oleh UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus, atau: a. seseorang berasal dari ras Melanesia dengan asal-usul Papua; b. Ibu atau Ayahnya berasal dari Papua; c. non-Papuan tapi menikah dengan seseorang asal Papua; d. asal non-Papua, tapi telah tinggal di Papua selama lebih dari 10 tahun.

³⁷ Untuk tujuan memenuhi target tersebut, AMDAL TEP mendefinisikan orang Papua yang merupakan IP, sebagai "Masyarakat adat atau kesukuan yang berada di wilayah pesisir Teluk Bintuni, yang terdiri dari klan asli Sebyar, Irarutu, Simuri dan Petuanan Arguni, Wertuar dan Kelompok etnis SekarPikpik, yang mendiami daerah tersebut secara pasti, serta anggota masyarakat lainnya di wilayah tersebut yang diakui oleh masyarakat adat sebagai bagian dari komunitas kesukuan mereka, dan telah tinggal di daerah adat sejak sebelum kehadiran LNG Tangguh di tahun 2002."

dilakukan untuk merekrut, melatih dan mempromosikan masyarakat Papua agar komitmen dapat dipenuhi dan BP tampaknya menyadari hal ini.³⁸

A. Program Magang Papua

Sebagai tanggapan, sebuah program pelatihan magang baru yang dimulai pada tahun 2016. BP mendirikan sekolah khusus untuk melatih masyarakat muda Papua, terutama dari wilayah Teluk Bintuni, untuk meningkatkan pekerja terampil dalam operasi Tangguh. Bersama dengan rekannya Petro Tekno, BP telah merekrut 40 lulusan SMA Papua yang ambisius yaitu sekitar 50/50 pria dan wanita yang dinilai berdasarkan kemampuan dan motivasi, untuk mengikuti program praktek langsung selama tiga tahun di Jawa Barat yang berfokus pada keterampilan bahasa Inggris, matematika dasar dan sains, yang kemudian mengajarkan setiap siswa sebuah program khusus dalam hal mekanik, listrik atau perawatan yang akan memberikan seperangkat keterampilan yang disesuaikan untuk pekerjaan operasi teknis di Tangguh. Setiap tahun, 40 siswa baru akan dipilih untuk memulai pelatihan ini. Setelah menyelesaikan program selama tiga tahun, mereka yang lulus akan ditawarkan pekerjaan di Tangguh (siswa tidak harus menerima tawaran tersebut).³⁹

Program ini memiliki potensi besar untuk menyediakan pekerjaan terampil dan teknis di Tangguh untuk masa mendatang. TIAP bertemu dengan beberapa siswa tahun kedua, yang telah mendemonstrasikan pemahaman canggih tentang apa yang mereka pelajari, tantangan di masa depan, dan antusiasme tentang potensi karir mereka di Tangguh.⁴⁰ Meskipun para siswa muda ini tidak akan segera menjadi manajer di Tangguh, kemungkinan mereka akan membentuk staf operasi inti yang terampil. TIAP sangat terdorong oleh program ini, dan mendesak BP untuk tetap berkomitmen selama posisi lulusan tersebut tetap tersedia. Berdasarkan tingkat atrisi, BP juga harus mempertimbangkan untuk meningkatkan mahasiswa awal kelas masuk menjadi lebih dari 40 siswa sehingga siswa yang lulus dapat mencapai 40 siswa setiap tahunnya.

B. Komite Pengarah Karyawan dari Papua

Bahkan dengan tambahan tenaga teknis berkualitas di tingkat *entry level*, BP perlu mengembangkan program yang efektif untuk mendukung dan mempromosikan tenaga kerja Papua ke posisi yang lebih terampil, manajerial dan pengawasan. Menuju ke tujuan tersebut, atas perintah karyawan Papua, dan rekomendasi TIAP,⁴¹ BP telah meningkatkan kerja sama dengan Komite Pengarah Karyawan dari Papua secara dramatis, sekelompok karyawan Papua, yang tidak dipilih oleh BP, tampaknya mewakili kelompok yang lebih

³⁸ Lihat Lampiran III.

³⁹ Program ini menggantikan program pelatihan magang Papua sebelumnya yang awalnya dilakukan di LNG Bontang, program ini banyak menyediakan masyarakat Papua yang secara teknis terampil untuk pekerjaan operasi, namun terbukti tidak memadai untuk menghasilkan keterampilan dan tingkat kinerja yang dibutuhkan. Lihat Laporan TIAP Oktober 2012 halaman 33.

⁴⁰ Pak Agustinus Rumansara berkeliling ke fasilitas di Ciloto, Jawa Barat dan bertemu dengan para siswa dan guru. Bupati Petrus juga baru saja mengunjungi fasilitas pelatihan tersebut, beliau menunjukkan dukungan dan antusiasme untuk program ini. Lihat "Teluk Bintuni Regent, Petrus Kasihw Visits Petrotekno, InfoFakFak.com," pada 23 Oktober tahun 2017.

⁴¹ Lihat Laporan TIAP Desember 2015 halaman 38-39.

luas. Banyak dari mereka yang pernah bekerja di Tangguh selama lebih dari satu dekade. Komite ini menyediakan mekanisme komunikasi reguler dan terorganisir untuk karyawan Papua untuk mengungkapkan masalah dan aspirasi mereka atau menyarankan gagasan mengenai pekerjaan dan peluang kerja. Selama dua tahun terakhir, sebagian besar kunjungan lapangan manajemen senior BP, telah bertemu dengan anggota komite yang ada dan mempertimbangkan saran mereka. Anggota komite melihat komitmen manajemen BP yang jauh lebih besar untuk mengatasi hambatan bagi pengembangan tenaga kerja di Papua.

Peningkatan pendampingan oleh para manajer merupakan satu area spesifik di mana interaksi ini dapat menimbulkan hasil. Semua karyawan Papua sekarang memiliki mentor, dan sebagian besar manajer senior melayani sebagai mentor setidaknya pada karyawan Papua. Meskipun program ini belum menimbulkan hasil yang seragam secara positif, sebagian besar karyawan percaya bahwa memiliki seorang mentor yang berdedikasi membantu membangun kepercayaan diri dan menghadapi tantangan untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Selama karyawan bebas mengubah mentor mereka tanpa konsekuensi yang merugikan, manajemen senior harus terus mendorong semua manajer di Tangguh untuk membimbing karyawan Papua yang memintanya.

Salah satu daerah di mana kemajuan tenaga kerja Papua masih terbatas adalah di Jakarta, di mana sejumlah tenaga kerja pengawas terkait Tangguh berada. Terdapat sedikit tenaga kerja Papua yang berada pada unit Pengadaan dan Manajemen Rantai Pasokan, misalnya, usaha untuk meningkatkan representasi mereka sangat terbatas. Tanpa pertanyaan, kemajuan pekerja Papua Tangguh tidak boleh terbatas pada peluang di lokasi LNG. Jika ada pembukaan lowongan di Jakarta, pekerja di Tangguh site harus diberitahu, dan tenaga kerja Papua yang memenuhi syarat harus diberikan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut.

C. Manajemen Tenaga Kerja Kontraktor

BP telah mengalami kesulitan dalam memberlakukan target tenaga kerja Papua pada kontraktor, baik dalam operasi maupun konstruksi. Dalam operasi, sebagian disebabkan oleh banyaknya kontrak yang hanya satu tahun, dan tidak memiliki waktu yang cukup untuk menerapkan persyaratan ini. Saat ini BP memiliki kewenangan untuk mengadakan kontrak dalam durasi lima tahun, durasi ini seharusnya dapat memberikan waktu yang cukup untuk memantau dan memberlakukan semua persyaratan tenaga kerja. Banyak pekerjaan yang berkaitan dengan operasi dikontrakkan. Didalam kontrak ini BP harus memasukkan hak untuk menjatuhkan sanksi keuangan kepada kontraktor yang tidak memenuhi persyaratan perekrutan tenaga kerja Papua yang telah disepakati sebelumnya dan BP harus menerapkan sanksi tersebut.

Dalam jangka waktu tiga tahun ke depan, sebagian besar perekrutan Papua akan dilakukan oleh konsorsium CSTS sesuai dengan persyaratan kontrak EPC.⁴² Proses ini membutuhkan perekrutan dan pelatihan pekerja Papua untuk angkatan kerja konstruksi, termasuk 100%

⁴² Kontrak untuk Teknik, Pengadaan dan Kontras LNG Onshore, untuk perluasan proyek Tangguh No. 4420001030, Bagian VIII.

pekerja tidak terampil, 93% pekerja semi terampil, 12% pekerja terampil dan 6% manajer. Kontrak tersebut mensyaratkan CSTS untuk mengembangkan Rencana Pengembangan Pekerja IP dan Papua, untuk melaporkan tentang pelaksanaan rencana tersebut setiap bulan, mengidentifikasi kesenjangan dan merancang perencanaan untuk menutup kesenjangan tersebut. Penting agar persyaratan ini dapat dipantau secara ketat dan segera dilaksanakan. Target ketenagakerjaan Papua telah terpenuhi saat pembangunan Kilang 1 dan 2; target harus dipenuhi selama TEP. Hal ini akan meminta BP untuk mengawasi ketentuan kontrak ini secara ketat, karena persyaratan ini mungkin tidak menjadi prioritas bagi semua entitas kontraktor. Jika langkah perekrutan atau pelatihan tambahan diperlukan, BP harus bersikeras agar dapat segera dilembagakan, karena dari segi waktu, sangatlah penting untuk memenuhi persyaratan dan kepatuhan, daripada denda.

D. Perekrutan dan Pengembangan Tenaga Kerja Papua yang lebih Terampil

Program magang BP untuk rekrutmen *entry level* akan melatih masyarakat Papua yang memulai karir mereka di Tangguh, namun program tersebut akan melakukan sedikit kemajuan dalam pengembangan manajer dan supervisor. Selama beberapa tahun, BP juga telah mengoperasikan program Pengembangan Kepemimpinan Emerging Papua, yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mempercepat kemajuan bagi masyarakat Papua yang menunjukkan keterampilan yang dibutuhkan manajemen. Saat ini ada 40 karyawan Papua didalam program ini, banyak di antaranya mungkin akan menjadi atasan atau pimpinan tim di Tangguh. Program ini penting dan harus dilanjutkan, namun program ini tidak mungkin dapat memenuhi semua permintaan untuk posisi manajer di masa mendatang.

Untuk memenuhi permintaan ini, BP harus meningkatkan rekrutmen masyarakat Papua dari luar, yang berpengalaman untuk mengisi posisi senior. BP belum mencurahkan perhatian yang cukup terhadap kebutuhan ini dari prospek di luar Tangguh, namun BP harus melakukannya, jika ingin memenuhi persyaratan untuk masyarakat Papua yang terampil dan manajerial pada tahun 2029. Paling tidak, BP harus meningkatkan pemberitahuan kepada publik mengenai lowongan pekerjaan di universitas-universitas dan pasar kerja lainnya di Papua, yaitu melalui iklan atau rekrutmen langsung di lokasi. Hal ini juga harus diketahui oleh karyawan Papuan mengenai semua kesempatan kerja, dan BP diharapkan untuk mendaftarkan karyawan Papua sebagai perekrut dan meningkatkan jaringan calon pelamar. Selanjutnya, BP harus menyewa konsultan tenaga kerja, dengan pengalaman di bidang ini, untuk mencari masyarakat Papua yang berbakat dan dipekerjakan oleh orang lain di posisi pengawasan atau manajerial, untuk pembukaan tertentu yang saat ini tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat Papua.

VI. PROGRAM SOSIAL DAN PENGEMBANGAN

BP telah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat selama 12 tahun program sosialnya berlangsung. Keberhasilan BP dalam program kesehatan, perkembangan pada mata pencaharian dan pengembangan usaha, ketenagalistrikan dan pendidikan telah memberikan manfaat material bagi sebagian besar tetangganya. Namun tantangan yang berat tetap ada dalam mencapai tujuan yang dijanjikan pada perumahan

dan infrastruktur di pantai utara, elektrifikasi dan pendidikan di daerah dan energi gas yang dibakar untuk provinsi tersebut.

A. Kesehatan

Peningkatan pada program pelayanan kesehatan di seluruh Teluk Bintuni harus dianggap sebagai pencapaian program sosial yang paling sukses. Meskipun BP tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas semua kemajuan kesehatan di Teluk Bintuni, perawatan kesehatan di wilayah tersebut telah meningkat secara drastis sejak BP memulai program perawatan kesehatan masyarakat pada tahun 2005.⁴³ Keberhasilan yang patut diperhatikan termasuk penurunan dramatis pada malaria, yang hampir hilang di wilayah tersebut (lihat Lampiran IV); pembentukan 27 klinik desa (posyandu), yang telah memperbaiki perawatan dalam pencegahan penyakit dan pengobatan di masing-masing desa yang terkena dampak. Dan juga, rumah sakit Bintuni yang merupakan satu-satunya rumah sakit di wilayah ini, rumah sakit ini bukan merupakan proyek yang didanai Tangguh, namun terdapat kemajuan besar dalam program perawatan kesehatan di wilayah ini. Rumah sakit Bintuni telah mendapat dukungan dari BP untuk memperbaiki kapasitasnya dan mengembangkan rumah sakit tersebut sebagai rumah sakit rujukan.⁴⁴ BP juga terus mendukung pelayanan rujukan darurat yang lebih baik, terutama untuk kelahiran berisiko tinggi di pusat kesehatan masyarakat Babo dan Aranday, memfasilitasi program kesehatan ibu dan anak di seluruh wilayah, termasuk meningkatkan akses anak terhadap imunisasi, pemantauan status gizi anak, dan menyediakan makanan tambahan untuk anak-anak yang kekurangan gizi. Terdapat kebutuhan untuk terus mendukung program yang mengurangi kesakitan dan kematian terkait dengan diare, TB dan HIV / AIDS. BP harus terus mendukung upaya-upaya tersebut secara aktif dengan tujuan untuk meningkatkan program kesehatan Teluk Bintuni menjadi standar nasional Indonesia.

B. Mata Pencaharian dan Pengembangan Usaha

Sejak konstruksi awal, diversifikasi mata pencaharian dan pengembangan usaha telah menjadi bagian dari komitmen AMDAL BP. Program tersebut termasuk usaha mikro, dukungan untuk koperasi pertanian dan perikanan yang dapat memasok kebutuhan Tangguh, pengembangan usaha perempuan dan pengembangan kapasitas di kalangan pengusaha lokal serta masyarakat adat untuk memungkinkan mereka memasok Tangguh dan pasar-pasar lainnya. Setiap program harus memiliki tingkat yang berbeda-beda dalam meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan perusahaan swasta. Akibatnya, terjadi peningkatan pendapatan yang dramatis bagi masyarakat di desa-desa sekitar sejak 2003, yaitu saat survei mengenai hasil pendapatan dimulai. Namun, kenaikan pendapatan tersebut terhenti atau mengalami penurunan sejak tahun 2013, dengan pendapatan rata-rata untuk semua distrik di sekitarnya menurun dari Rp. 6.907.000 pada tahun 2013 menjadi Rp. 6.591.000 pada tahun 2016.⁴⁵

⁴³ Lihat, misalnya Laporan TIAP March 2009 halaman 33-34.

⁴⁴ Lihat Laporan TIAP December 2015 halaman 40.

⁴⁵ Lihat Laporan TIAP 2011 halaman 21 dan Laporan TIAP Maret 2009 halaman 35-36 untuk penjelasan lebih lengkap tentang sejarah program-program tersebut. Lihat Laporan TIAP Maret 2014 di Lampiran III

Meskipun beberapa penurunan ini dapat dikaitkan dengan faktor makro ekonomi, termasuk rendahnya harga minyak dan gas dan perusahaan lainnya yang mengalami penurunan dalam kegiatan di wilayah tersebut, hasilnya menunjukkan perlunya program mata pencaharian yang aktif dan efektif agar terus berjalan di wilayah ini. Pada kunjungan ini, TIAP mengunjungi dua usaha yang paling menjanjikan: koperasi pertanian lokal di Tanah Merah Baru, dan gerai baru di Sorong untuk dua usaha asli yang telah dimulai di Bintuni.⁴⁶

Usaha pertanian dan penangkapan ikan sukses besar. Total pasokan ke Tangguh pada tahun 2016 sebesar 303 ton, dengan nilai sekitar 800.000 Dolar AS. TIAP memeriksa produk segar yang disimpan di TMB dan anggota TIAP menikmati buah-buahan dan sayuran tersebut, serta ikan segar dan udang yang disediakan oleh koperasi lokal, yang disajikan untuk semua pekerja dan tamu di Tangguh. Peserta percaya bahwa program tersebut dapat dan harus diperluas selama konstruksi. BP diwajibkan oleh AMDAL TEP untuk mendapatkan 10% kebutuhan TEP selama konstruksi dan 65% pasca konstruksi. Hal tersebut akan memerlukan peningkatan produksi lebih lanjut oleh pihak koperasi, kemungkinan perluasan titik stok atau peningkatan *pick-up*. BP harus bekerja sama dengan Indocater dan koperasi untuk mencapai komitmen ini tanpa degradasi pada kualitas.

Peningkatan kapasitas koperasi ini juga harus dikoordinasikan dengan CSTS untuk menjamin penggunaan produk koperasi secara maksimal selama konstruksi TEP. Sebagaimana dicatat, CSTS diharuskan melakukan upaya-upaya terbaiknya untuk sumber lokal ini yaitu minimal 10% dari semua pembelian ikan, buah, sayuran, kacang polong, pati dan tanaman pertanian lainnya yang langsung dibeli dari produsen IP lokal.⁴⁷ Semua pembelian harus dilaporkan ke BP setiap bulan. Jika pembelian minimum tidak tercapai, CSTS harus mengembangkan rencana untuk mengatasi kekurangan atau ketidaksesuaian. BP harus melakukan pemantauan pengadaan oleh kontraktor ikan lokal, memproduksi dan produk lainnya serta meminta agar setiap kekurangan harus segera diatasi. Jika kekurangan tersebut tidak diperbaiki, BP harus mengajukan denda berdasarkan kontrak. Sanksi keuangan apapun harus diinvestasikan ke dalam fasilitas dan peralatan koperasi.

BP terus mendukung pengembangan usaha pribumi secara terpisah. SKKMigas telah memberikan wewenang kepada BP untuk melakukan pengadaan hingga 20.000 Dolar AS dari sumber yang memiliki kualifikasi lokal tanpa penawaran yang kompetitif. BP kembali melakukan pendampingan kepada pengusaha lokal yang berminat untuk membiasakan para pengusaha lokal dengan Kode Etik BP dan persyaratan lainnya untuk menjadi pemasok ke Tangguh. Sejauh ini, satu-satunya kontrak yang diberikan kepada peserta dalam program ini adalah penyediaan alat tulis kantor Tangguh. Program ini penting, namun sangat terbatas. BP harus menggali peluang produk atau layanan lainnya yang dapat dipasok oleh perusahaan-perusahaan lokal yang berkualitas ini.

Salah satu elemen yang paling terlihat dari program pengembangan usaha adalah pembentukan bisnis baru yang dijalankan oleh IP, yaitu *Business Development Service*

dan Laporan TIAP Oktober 2012 di Lampiran III untuk data komparatif yang bersejarah pada pendapatan masyarakat adat dan masyarakat lainnya di sekitar desa-desa terdekat.

⁴⁶ Lihat Laporan TIAP Desember 2015 halaman 43.

⁴⁷ Lihat Kontrak EPC, Bagian VIII Konten Lokal.

("BDS"). Program pengembangan ini menyebabkan terciptanya perusahaan lokal SUBITU yang mengoperasikan dua bisnis IP secara terpisah: manufaktur pakaian, terutama kaos dan seragam; serta penjualan dan perbaikan AC. Perusahaan dan fasilitas aslinya didirikan di Bintuni pada tahun 2015.⁴⁸ SUBITU sekarang memiliki kantor penjualan dan pelayanan secara terpisah di Sorong dan sedang mempertimbangkan lokasi lainnya di Manokwari. Kedua bisnis tersebut terlihat menjanjikan, bisnis dikelola oleh karyawan yang antusias dan terlatih, dan tentunya bisnis ini telah memberikan kesempatan baru kepada IP lokal. Dukungan BP secara langsung terhadap perusahaan ini dijadwalkan akan berakhir pada tahun 2019. Hal ini merupakan elemen penting dan simbol pembangunan Papua. Kegagalan dari salah satu bisnis ini akan berdampak buruk pada keseluruhan program pengembangan perusahaan BP. BP harus terus memelihara bisnis ini karena mereka berusaha keras untuk menjadi perusahaan yang menguntungkan.

C. Perumahan Pantai Utara

Konstruksi atau restorasi perumahan pantai utara yang dulunya merupakan tempat DAV telah menjadi aspirasi para penduduk desa pantai utara sejak transmigrasi dan pembangunan desa pantai selatan yang dimulai pada tahun 2005. Proposal untuk perumahan baru atau perumahan yang direnovasi di desa-desa pantai utara telah dibahas sejak saat itu,⁴⁹ bahkan meskipun tidak ada persyaratan legal atau AMDAL untuk program tersebut. TIAP mendesak BP untuk terus maju dalam program perumahan pantai utara, meskipun apakah Kilang 3 telah dilanjutkan atau tidak.⁵⁰ Kebutuhan untuk mendesak program ini terlihat sangat jelas saat mengunjungi desa-desa di pesisir utara yang terkena dampak. Selain itu, penundaan yang panjang terhadap perumahan pantai utara dapat menyebabkan tindakan yang mengganggu operasi Tangguh atau TEP. Masalah penundaan ini harus menjadi prioritas.

Setelah TEP dimulai, program perumahan pantai utara juga merupakan bagian dari persyaratan di bawah AMDAL. Program ini merupakan sebuah program terperinci yaitu membangun 456 rumah di distrik Wiriagar dan Tomu, berdasarkan sensus 2013 program tersebut telah direncanakan sepenuhnya dan siap untuk dimulai. Warga desa memilih untuk tetap berada di lokasi dataran rendah, setelah diberi kesempatan untuk membangun kembali desa-desa di tempat yang lebih tinggi. Sebuah kesepakatan kerja sama telah ditandatangani oleh pemerintah daerah pada tahun 2016. Namun, karena beberapa keluhan mengenai jumlah dan desain rumah, serta perselisihan mengenai kompensasi adat kepada para penduduk desa tersebut, Gubernur dan Bupati yang baru menghentikan pelaksanaan program perumahan pantai utara. Gubernur dan Bupati menyarankan agar proses resolusi konflik adat (Gelar Tikar Adat), dapat segera diselesaikan, sebelum pembangunan rumah pantai utara dimulai. TIAP menghargai inisiatif untuk menggunakan GTA sebagai platform resolusi konflik berbasis masyarakat, terutama di tingkat desa, dan mendesak BP untuk mempelajari lebih lanjut rincian GTA serta menilai apakah Tangguh dapat menggunakan

⁴⁸ Lihat Laporan TIAP Desember 2015 halaman 43.

⁴⁹ Lihat Laporan TIAP May 2014 halaman 28-30 untuk ringkasan.

⁵⁰ Lihat Laporan TIAP Desember 2015 halaman 33-34.

mekanisme adat ini untuk menyelesaikan masalah adat yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Meskipun platform GTA belum diimplementasikan, pada awal Desember, Bupati mengumumkan bahwa beliau akan menghentikan penangguhan tersebut dan memulai proses tender untuk rumah di distrik Weriagar, Tomu dan Taroi. Semoga upaya tersebut akan mengakibatkan dimulainya kembali program dan konstruksi tepat waktu. Keterlambatan dalam permulaan program perumahan pantai utara bukan hasil dari tindakan BP, dan tidak berada di dalam kendali BP. Namun demikian, program ini diperlukan oleh BP berdasarkan AMDAL, program tersebut diharapkan oleh BP serta banyak penduduk kampung di utara, yang kepercayaan dan dukungannya sangat penting untuk keamanan Tangguh, pengembangan lebih lanjut dan keberhasilannya akan dijadikan sebagai model.

Oleh karena itu, meskipun BP tidak bisa mengambil peran pemerintah daerah. BP harus secara aktif terlibat dengan pejabat lokal dan nasional dalam upaya untuk membantu menyelesaikan perselisihan ini. Jika program tidak segera dilanjutkan, BP tidak akan dapat memenuhi komitmen AMDAL secara tepat waktu.

Jika keputusan Bupati mengarahkan agar implementasi program dipercepat, BP harus berupaya mempercepat jalur waktu untuk segera menyelesaikan setidaknya tahap yang direncanakan pada tahun 2020, yaitu bertepatan dengan pembukaan Kilang 3. Jika program tersebut terhenti, BP harus terlibat dengan pejabat senior Pemerintah Indonesia, termasuk jika mungkin Kantor Presiden, untuk meminta bantuan mereka dalam menengahi dan menegosiasikan solusi cepat. BP dapat mengusulkan rekomendasi alternatif seperti memulai pelaksanaan program secara bertahap, mengizinkan diskusi mengenai cakupan program yang tepat untuk terus berlanjut sementara beberapa konstruksi berjalan. Jika penundaan berlanjut sampai tahun 2018, BP harus meminta otoritas dari SKKMigas untuk mendanai pembangunan di beberapa perbaikan infrastruktur yang dipilih oleh masing-masing kampung, seperti jembatan baru, bangunan umum atau jalan setapak, sebagai demonstrasi niat baik BP dan sebagai bentuk kompensasi atas penundaan pembangunan perumahan pantai utara.

D. Elektrifikasi

Elektrifikasi di kota dan desa Teluk Bintuni telah lama menjadi prioritas masyarakat dan para pemimpin daerah. Hal tersebut telah menjadi sumber ketegangan sejak elektrifikasi ketiga desa yang telah dimukimkan kembali di pantai selatan pada tahun 2005.⁵¹ Untuk mengatasi aspirasi ini, pada tahun 2013 BP membangun gardu listrik yang menghubungkan Tangguh dengan jaringan listrik hingga 8MW untuk didistribusikan ke wilayah tersebut. Bekerja sama dengan Bupati dan PLN, dalam dua tahun ke depan gardu ini akan dihubungkan dengan kabel bawah laut ke kota Bintuni dan melalui jaringan ke beberapa kampung di pantai selatan. Penghubungan listrik ini memungkinkan operasi rumah sakit baru di Bintuni serta memacu pembangunan ekonominya. PLN juga membangun infrastruktur *grid* untuk menghubungkan kampung-kampung di pantai utara yang tersisa. Sejauh ini, PLN telah menolak untuk membangun interkoneksi antar *grid* dengan

⁵¹ Lihat, misalnya, Laporan TIAP Maret 2007 halaman 25.

kampung-kampung yang lebih jauh di pantai selatan dan Babo. Pengiriman dan ekspektasi listrik yang dapat diandalkan untuk wilayah ini merupakan alasan utama banyaknya dukungan lokal terhadap Tangguh. Sayangnya, belum ada kemajuan nyata dalam program esensial ini sejak kunjungan terakhir TIAP. Tidak ada listrik berbasis *grid* yang dikirim ke kampung-kampung di pantai utara, atau ke Babo dan kampung-kampung terdekat di pantai selatan. Menyadari pentingnya listrik yang dapat diandalkan di Babo, yang merupakan tuan rumah lapangan terbang dan fasilitas kelautan yang penting bagi operasi Tangguh, BP telah meminjamkan generator diesel ke Babo, yang menyediakan listrik ke beberapa bagian masyarakat.

Kegagalan dalam memberikan listrik andal ini, seperti halnya dengan perumahan di pantai utara, tidak dapat dikaitkan dengan BP karena BP telah membuat daya yang dibutuhkan tersedia. PLN telah gagal dalam membangun jaringan listrik di pantai selatan, mencatat kesulitan biaya dan medan, hal tersebut telah menunda pemberian listrik di desa-desa pantai utara sampai perumahan baru dibangun. Kegagalan tersebut menghasilkan perbedaan yang mencolok terhadap manfaat di antara wilayah yang memiliki listrik andal 24/7 dengan wilayah yang memiliki biaya diesel mahal dalam beberapa jam per hari. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, rasio elektrifikasi di Papua Barat meningkat dari 82,7% menjadi 91,76% selama dua tahun terakhir. Jika persentase tersebut akurat, Teluk Bintuni memiliki sedikit elektrifikasi jika dibandingkan dengan sebagian besar provinsi di Papua Barat.

BP tidak bisa mengambil peran PLN. Namun BP dapat bekerja sama dengan para pemimpin di tingkat nasional, termasuk SKKMigas, KPPIP dan pemimpin lainnya untuk mendorong PLN membuat kemajuan dalam tujuan esensial ini. Dalam upaya ini, BP juga harus berusaha melibatkan Presiden serta penasihatnya dari Papua. Elektrifikasi daerah pedesaan dan pembangunan ekonomi di Papua Barat telah dideklarasikan sebagai prioritas utama Presiden.⁵²

Bahkan melalui upaya ini, dibutuhkan beberapa saat untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, sampai PLN memperpanjang daya berbasis *grid* dari Tangguh ke Babo dan kampung-kampung di sekitar wilayah, BP harus meminta SKKMigas untuk memberi izin peningkatan pembangkit listrik berbasis diesel sementara untuk Babo, sehingga Babo memiliki kekuatan elektrifikasi 24/7. BP juga harus mencari dukungan untuk menyediakan lampu tenaga surya, yang murah dan berjangka pendek untuk setiap rumah tangga di kampung-kampung tanpa kekuatan berbasis *grid*, sehingga tetangga Tangguh dapat memiliki cahaya dan refrigerasi.

⁵² Baru-baru ini, Presiden Jokowi mengunjungi Papua dan mencatat bahwa pasokan listrik di Papua masih tidak stabil. "Presiden sendiri mengalami tiga pemadaman listrik dalam satu malam. Dia mendesak PT PLN untuk memperbaiki jasanya dan berjanji kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mempercepat ketenagalistrikan di Papua." Lihat "[President: Power Supply in Papua Still Unstable](#)" Investor Daily, 21 Desember tahun 2017 halaman 9. Lihat juga "Papua and Papua Barat to be Prioritized" Media Indonesia, 7 Maret tahun 2017 halaman 24.

E. *Gas to Power* untuk Provinsi Papua

Gas to Power untuk wilayah Papua merupakan salah satu komitmen mendasar yang dibutuhkan BP untuk persetujuan TEP. BP diwajibkan oleh AMDAL untuk mengalokasikan hingga 20mmcf/hari (0.16mtpa) untuk kebutuhan listrik di wilayah Papua, sehingga Tangguh dapat menjadi pemasok utama bahan bakar untuk Papua dan Papua Barat pada tahun 2020.⁵³ Gas yang andal serta bahan bakar bensin ekonomis merupakan salah satu kunci perbaikan infrastruktur utama Presiden Jokowi, yang dimaksud untuk mempercepat pembangunan di Papua. Sebagai bagian dari TEP, BP sedang membangun fasilitas lepas pantai baru yang dibutuhkan untuk menampung 10,000-20,000 m3 kapal LNG mini. Kapal tanker mini tersebut dapat memasok terminal-terminal penerima (*receiving terminals*) di masing-masing kota di kawasan, termasuk Sorong, FakFak, Manokwari dan Jayapura. Karena pentingnya pembangunan ekonomi di Papua, program ini didukung di tingkat nasional yaitu oleh KPPIP dan PLN.

Namun, saat ini, tidak ada kapal tanker mini LNG yang sedang dibuat atau dipesan, dan juga tidak ada terminal-terminal penerima (*receiving terminals*) yang sedang dirancang atau dibangun. Sebelum pembangunan infrastruktur yang diperlukan dimulai, hukum Indonesia mengharuskan pemerintah provinsi untuk membentuk perusahaan milik daerah (dikenal dengan "BUMD"), yang pada awalnya akan membutuhkan kesepakatan Gubernur dan DPRD daerah. Meskipun program ini telah mendapatkan dukungan kuat dari Gubernur sebelumnya yaitu Bram Atururi serta dukungan dari Gubernur baru. Pada saat kunjungan TIAP, BUMD masih belum didirikan. Namun, pada bulan November, Gubernur dan DPRD telah menyetujui pembentukan BUMD dan sebuah dewan direksi pada 22 November tahun 2017. Persetujuan ini merupakan kemajuan substansial. Dan diharapkan dapat memungkinkan tindakan yang dibutuhkan agar LNG Tangguh dapat memasok ke Papua dan Papua Barat.

Seperti halnya perumahan dan elektrifikasi, BP telah memenuhi semua kewajibannya untuk program ini. BP telah memberikan dukungan teknis dengan mendanai studi kelayakan untuk provinsi ini. BP telah membangun semua fasilitas yang dibutuhkan di Tangguh untuk mendukung program. BP tidak dapat membangun *receiving terminals* (terminal akan dimiliki oleh PLN) atau kapal tanker mini (kapal tanker mini akan dimiliki oleh BUMD). Dan pembangunan infrastruktur tersebut akan memakan waktu lama. Oleh karena itu, penting agar pemerintah daerah segera bertindak jika Tangguh akan memasok di wilayah ini bertepatan dengan selesainya TEP pada tahun 2020. Meskipun BP telah membantu pemerintah daerah, BP harus terus bekerja lebih aktif dengan Gubernur dan para pimpinan DPRD, untuk memastikan mereka sepenuhnya bahwa BP membutuhkan tindak lanjut secepatnya. Bahkan dengan berdirinya BUMD, tanpa implementasi yang efisien, Papua Barat tidak dapat memamerkan pembangkit listrik tenaga gas barunya saat Indonesia mengalihkan perhatiannya ke Papua pada tahun 2020 untuk Olimpiade Nasional, dan komitmen BP dalam memasok gas ini tidak akan terpenuhi.

⁵³ Pemerintah Indonesia memiliki ketertarikan untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur pada tahun 2020, yang merupakan tahun dimana Olimpiade Nasional Indonesia akan diadakan di Papua.

F. Edukasi

Meningkatkan pendidikan dasar dan menengah di Teluk Bintuni telah menjadi program sosial prioritas bagi BP, sejak pembangunan Kilang 1 dan 2.⁵⁴ Program tersebut juga merupakan prioritas disetiap tingkat pemerintahan. Melalui beberapa mitra pendidikan, BP telah mendukung program tersebut dengan membawa guru-guru yang berkualitas ke kampung-kampung serta meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan setempat. Upaya tersebut cukup bermanfaat, dimana kehadiran siswa dan nilai tes telah mengalami peningkatan. Namun persediaan tidak mencukupi, terutama untuk pendidikan sains dan teknik, dan siswa-siswa di wilayah Bintuni tetap berada di bawah norma nasional dengan sedikitnya kinerja yang dibutuhkan untuk beralih ke tingkat yang lebih tinggi.⁵⁵

Untuk mengatasi kesenjangan pendidikan, BP dan masyarakat setempat telah sepakat untuk mendirikan satu atau lebih sekolah unggulan di wilayah Bintuni. Dimana fasilitas dan guru menjadi lebih unggul melalui sekolah unggulan tersebut, dan siswa terbaik dapat mengikuti dan mempersiapkan pendidikan tinggi yang lebih efektif. Sayangnya, meski terlihat adanya kesepakatan konsep dari semua pihak, jarang ada kemajuan implementasi dalam program tersebut. Membentuk sekolah atau sekolah unggulan tidak hanya memberikan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak di Teluk Bintuni dengan tekad dan determinasi yang tinggi, namun juga akan membantu BP memenuhi komitmennya untuk mengembangkan dan mempekerjakan orang-orang Papua yang terampil dan terdidik untuk mengoperasikan Tangguh.

Terdapat penundaan yang cukup lama dalam mengimplementasikan komitmen ini. Sebagian disebabkan oleh absennya pengadaan mitra pendidikan baru, perselisihan mengenai lokasi sekolah, dan juga karena ada beberapa pejabat baru di dinas Pendidikan yang baru.⁵⁶ Akan tetapi, saat ini, sekolah unggulan adalah unsur terpenting dari dukungan BP untuk pendidikan lokal. Sekolah unggulan secara khusus disarankan oleh dua Menteri Koordinator Bidang Keamanan dan Politik, dan telah lama didorong oleh TIAP. BP harus bekerja sama dengan mitra pendidikan dan badan pendidikan lokal untuk membentuk satu cabang sekolah unggulan prioritas di Teluk Bintuni. Meskipun sekolah harus dimulai sesegera mungkin, program tersebut seharusnya sudah berfungsi sepenuhnya, yaitu paling lambat ketika operasi Kilang 3 dimulai.

G. Hubungan Masyarakat

Tim Hubungan Masyarakat BP telah berhasil mengembangkan kepercayaan dengan sebagian besar anggota masyarakat setempat, dari penduduk kampung yang terlibat dalam program sosial BP, kepala kampung dan Bupati. Hubungan ini memberikan BP ukuran tambahan terhadap keamanan serta kesabaran dan pengendalian yang lebih besar dalam bereaksi terhadap perselisihan atau penundaan program sosial. Meskipun ada beberapa

⁵⁴ Lihat Laporan TIAP Maret 2009 halaman 30-31 dan Laporan TIAP Maret 2007 halaman 22-23.

⁵⁵ Secara terpisah, BP terus memberikan beasiswa untuk siswa Papua di sekolah menengah atas dan universitas. Saat ini BP mendanai 215 siswa. Lihat Laporan TIAP Maret 2009 halaman 31-32 untuk tinjauan awal program beasiswa yang lebih rinci.

⁵⁶ Fasilitas fisik untuk sekolah unggulan telah dibangun di Tanah Merah Baru dan saat ini fasilitas tidak terpakai.

ancaman verbal dari individu yang frustrasi terhadap operasi BP, terutama di kampung-kampung pantai utara, kebanyakan penduduk setempat telah memahami bahwa BP tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas kelambanan program dan bahwa BP pada umumnya berada di pihak mereka. Hubungan ini terlihat di setiap kampung yang dikunjungi TIAP. Hubungan BP dengan masyarakat setempat tidak akan lancar dan damai tanpa perhatian secara konstan yang diberikan oleh tim hubungan masyarakat.

Lampiran I
Peta Provinsi Papua dan Papua Barat



Lampiran II
**PEMANGKU KEPENTINGAN YANG BERKONSULTASI DENGAN TIAP
KUNJUNGAN TAHUN 2017**

Pejabat Pemerintah: Indonesia

- Amien Sunaryadi, Kepala SKKMIGAS
- Desta Djumena, Kepala Percepatan Pembangunan Ekspansi Tangguh (UPP)
- Dua Sekretaris Bapak Amien dan Bapak Desta
- M.G. Andri Soetarno, Deputi Bidang Politik Rumah Tangga
- DR. Lutfi rauf, M.A., Deputi Politik Luar Negeri
- Rear Admiral Halomoan Sipohutar, Deputi Pembela Nasional
- M.G. Wawan Rustiawan, Staff Khusus Sumber Daya Manusia
- Montty Giriana Ph.D., Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Triharyo Soesilo, Direktur KPPIP
- Andi Novianto, Asisten Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Andhika Chrisnayudhanto, Direktur Kerja sama Regional dan Multilateral BNPT
- Ignasius Jonan, Menteri ESDM

Pejabat Pemerintah: Amerika Serikat

- Joseph R. Donovan, Jr., Duta Besar AS untuk Indonesia

Pejabat Pemerintah: Inggris

- Moazzam Malik, Duta Besar Inggris untuk Indonesia

Pejabat Pemerintah: Papua dan Papua Barat

- Domingus Mandacan, Gubernur Papua Barat (Pertemuan dilakukan di Jakarta)
- Brigadir Jenderal Pol. Drs. Rudolf Alberth Rodja, Kapolda Papua Barat
- Mayor Jenderal TNI Jopye Onesimus Wayangkau, Panglima Komando Daerah Militer XVIII Kasuari
- AKBP Dewa Made Sidan Sutrahna.SIK, Kepala Polres Teluk Bintuni
- Petrus Kasihw, Bupati Teluk Bintuni

Mitra Pelaksana

- Sarwono Pratomo Satrio, Presiden Direktur, Petrotekno
- Henda Pribadi, Direktur, Pretrotekno

Lembaga Swadaya Masyarakat (NGOs)

NGOs di Jakarta

- Fery Marisan, Elsham
- Yan Cristian Warinusi, LP3BH Manokwari
- Robert Mandosir, International RM&D Institute
- Yance Defretes, Internasional Konservasi

Analisis Sektor Swasta

- Douglas Ramage, Bower Asia Group
- Sidney Jones, Direktur, Institute for Policy Analysis of Conflict

Perorangan

- Bambang Permadi Soemantri Brodonegoro, Kepala Bappenas
- John McBeth, Jurnalis

Lampiran III
Bagan Tenaga Kerja

Tangguh Ops. (as per July 2017)

Skilled level	Papuan	National/ Expatriate	Total employee	% Papuan by level	% Papuan population by Total
Unskilled	19	2	21	90%	1%
Low skilled	195	15	210	93%	13%
Semi skilled	278	64	342	81%	19%
Skilled	225	479	704	32%	15%
Managerial/supervisor	64	156	220	28%	4%
Total	781	716	1497	52.2%	52.2%

Tangguh Expansion Project (as per July 2017)

Skilled Level	IP			BF			Papuan			National / Expat			Overall H/C
	Actual		AMDAL	Actual		AMDAL	Actual		AMDAL	Actual		AMDAL	
	H/C	%	%	H/C	%	%	H/C	%	%	H/C	%	%	
Unskilled	69	91%	20%	7	9%	25%	0	0%	55%	0	0%	0%	76
Semi Skilled	93	32%	10%	34	12%	20%	87	30%	63%	75	26%	7%	289
Skilled	11	1%	0%	43	5%	2%	85	10%	10%	683	83%	88%	822
Managerial/ Supervisor	0	0%	0%	0	0%	1%	3	2%	5%	165	98%	94%	168
Total	173			84			175			923			1355

Lampiran IV

